



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelahhari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 selesai disusun. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj), dimana setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja ini merupakan suatu media pertanggung jawaban yang sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan aparatur organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta menggambarkan mengenai kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang dikerjakan mengacu sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu dapat menggambarkan tentang efisien dan efektivitas biaya, serta kedisiplinan dan ketaatan terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun yang merupakan langkah strategis dan tindakan operasional untuk merealisasikan capaian kinerja dan capaian sasaran.

Sejalan dengan adanya ketentuan tersebut, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2022, dalam rangka upaya mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja. Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 ini disusun semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan datang.

Pelaihari, Maret 2023

Kepala Dinas,



Ir. NOR HIDAYAT
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19630824 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

➤ **Mekanisme Penyusunan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

➤ **Mekanisme Pengukuran**

Prioritas kebijakan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah “Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian penduduk KB, Ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta meningkatkan perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Diskriminasi”.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 telah menetapkan 4 (empat) tujuan, 9 (sembilan) sasaran strategis.

Ke 9 (Sembilan) sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 (Sembilan) indikator kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Ringkasan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut :

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Pro Poor / Pro Job dan SDG's. Selain itu, juga mendukung kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pro Poor dan SDG's, capaian kinerja dengan perincian untuk :

- **Sasaran Satu (1)** : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) realisasi 1,42 dari target 1,58 dengan capaian kinerja 111,27%.
- **Sasaran Dua (2)** : Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,12 dari target 2,24 dengan capaian kinerja 105,66%
- **Sasaran Tiga (3)** : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi 72,86% dari target 68,42 dengan capaian kinerja 106,23%
- **Sasaran Empat (4)** : Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak dengan indikator adalah :
 - ✓ Skor capaian Kota Layak Anak (KLA) realisasi skor 575,25 (Pratama) dari target 700 (Madya) dengan capaian kinerja 78,71%.
- **Sasaran Lima (5)**: Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan realisasi 100% dari target 100% yang berupa sebuah dokumen;

- **Sasaran Enam (6) :** Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase PUS yang ber KB terealisasi 74,68% dari target 90% dengan capaian kinerja 82,98%.
- **Sasaran Tujuh (7) :** Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan indikator adalah :
 - ✓ Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) terealisasi 11,71% dari target 9,00 % dengan capaian kinerja 76,86 %.
- **Sasaran Delapan (8) :** Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak dengan dua indikator adalah :
 - ✓ Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan Perempuan dan Anak 49 kasus dengan capaian 100% dari yang melapor 49 kasus tertindaklanjuti 100%.
- **Sasaran Sembilan (9) :** Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dengan indikator adalah :
 - ✓ Prosentase tata kelola administrasi perkantoran dengan capaian 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%.
 - ✓ Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD dengan indikator 1) persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian target 100% tercapai 100% dengan capaian kinerja 100%, 2) persentase perencanaan dan keuangan SKPD target 100% tercapai 100% dengan capaian kinerja 100%, 3) nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah SKPD target 75 (BB) tercapai 74 (BB), 4) Nilai Reformasi Birokrasi target 75 (BB) tercapai 87,63 (BB).

Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	5
C. Isu Strategis	9
D. Produk dan Layanan	9
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Visi RPJMD	12
B. Misi RPJMD	12
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
D. Indikator Kinerja Utama	17
E. Perjanjian Kinerja	17
F. Program dan Kegiatan	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	27
1. Sasaran RPJMD	28
2. Eselon II (Kepala Dinas)	32
3. Eselon III (Kepala Bidang) B	73
4. Eselon III (Sekretaris) A	87
5. Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian).....	97
6. Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	99
B. Akuntabilitas Keuangan	101
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022	101
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	108
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022	115
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Strategi Peningkatan Kinerja	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu strategi pokok pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan strategi untuk mencapai penurunan laju penduduk (LPP), angka kelahiran (Total Fertility Rate /TFR), keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kependudukan, KB, perempuan dan perlindungan anak ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengendalian Penduduk, KB dan Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses penurunan laju penduduk (LPP) dan perempuan terhadap program pembangunan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan perlindungan Anak maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang salah satunya adalah Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat betapa pentingnya pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, maka dituntut kepedulian konkret lebih besar dengan menempatkannya sebagai salah satu bidang program dengan tujuan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, tidak terbatas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan proyek pembangunan.

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
7. Undang-Undang Dasar RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
8. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 3 disebutkan bahwa "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat ";
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
11. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
13. Tap MPR RI Nomor 4 / MPR / 1999 tentang GBHN 1999, dijelaskan bahwasan bidang sosial dan budaya, kedudukan dan peranan perempuan terdiri dari :
 - Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
 - Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis perjuangan perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
23. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
24. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
25. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
26. Nota Kesepahaman antara Departemen Sosial RI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Komunikasi dan Informasi RI dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dan Plan Indonesia Nomor : K. Tel. 232/HK 840/UTP cc/06 dan Nomor : 206/Plan/CO/CD/VII/2006.
27. Peraturan kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 143/HL-010/B5/2009.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
29. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

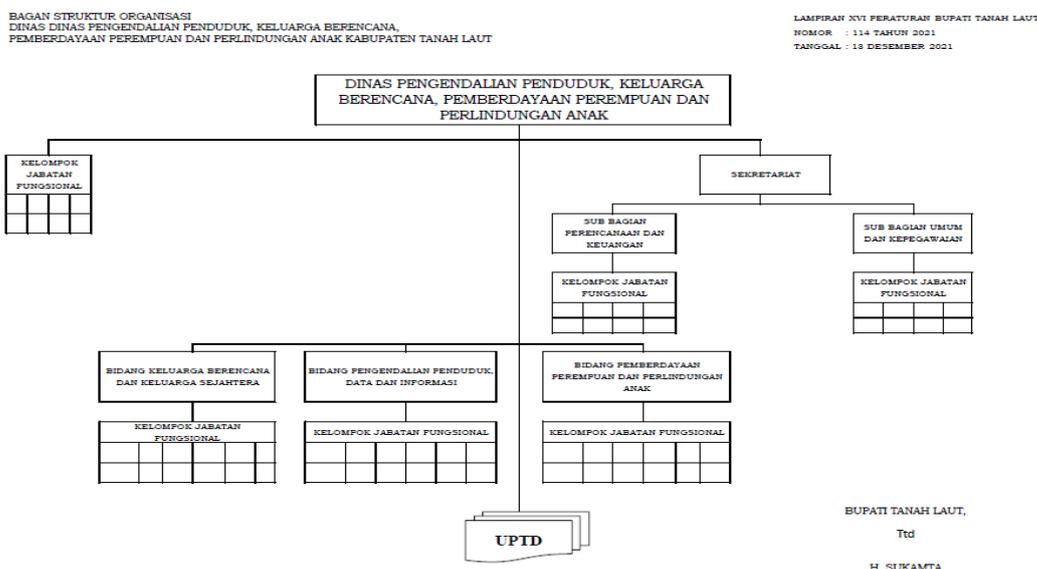
Adapun Tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

5. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
6. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
8. Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per Desember 2022 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS Daerah	8	20	28
2	PTT Daerah	12	6	18
	Jumlah	20	26	46

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	12	1	13
4	Golongan IV	5	5	10
	Jumlah	19	7	27

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	2	1	3
4	DIPLOMA III	0	3	3
5	STRATA I	4	12	16
6	STRATA II	2	3	5
	Jumlah	8	19	27

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Esselon	Jumlah		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	Esselon II	1	0	1
2	Sekretaris	Esselon II	1	0	1
3	Kepala Bidang		1	2	3
4	Kasubbag/Kepala Seksi	Esselon IV	0	2	2
5	Kepala UPT		0	1	1
	Jumlah		3	5	7

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis pada Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk;
2. Tingginya TFR (Total Fertility Rate);
3. Belum optimalnya penyediaan informasi data mikro keluarga;
4. Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB;
5. Belum optimalnya pelayanan KB dan keluarga Sejahtera;
6. Belum optimalnya kesetaraan gender;
7. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan Anak;
8. Masih ditemukan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
9. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja SKPD.

D. PRODUK DAN LAYANAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana maka produk dan layanan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Advokasi dan Fasilitasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta penyediaan Data Informasi Mikro Keluarga.
2. Pelayanan Keluarga Berencana,
3. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan kesehatan
4. Pelaksanaan penyiapan generasi berencana melalui Pembinaan PIK remaja
5. Pembinaan dan evaluasi program Tribina dan terhadap kegiatan program Genre,
6. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
7. Melakukan pendistribusian Alat Kontrasepsi ke klinik tingkat desa;
8. Memberikan persyaratan, kecepatan dan prosedur pelayanan Administrasi perkatoran ;

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka produk dan layanan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Perempuan Peningkatan kualitas hidup perempuan

2. Kegiatan Fasilitasi dan kordinasi pelaksanaan pelayanan dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak
3. Pemenuhan hak anak dan pengembangan kabupaten menuju layak anak.

Dari kegiatan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan capaian indikator kinerja organisasi serta dalam melaksanakan kegiatan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak selalu berpedoman kepada Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan Undang-undang Dasar RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama tahun 2022 Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berpedoman Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tanggal 06 Januari 2023 Nomor 065/009a/ORG, hal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD.

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA, menjelaskan secara ringkas dokumen perjanjian kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan terkait dengan capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Tanah Laut terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah yaitu : **“TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI (Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi).**

B. MISI RPJMD

Untuk mewujudkan misi Bupati Tanah Laut terkait tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mewujudkan **3 (Misi)** yaitu :

1. **Misi ke I (Satu)** yaitu Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. **Misi ke 3 (Tiga)** yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
3. **Misi ke 5 (Lima)** yaitu Membangun Sinergitas yang Baik antar Tingkat Pemerintahan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Keberlangsungan ber KB Serta Pengendalian Angka Kelahiran.
2. Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
3. Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan yang Baik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra 2019-2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun);
3. Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga ;
4. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
5. Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang Ber KB;
6. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender
7. Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak
8. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak;
9. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
10. Meningkatnya Reformasi Birokrasi

Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Akhir Renstra
Misi 1 : Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terwujudnya Keberlangsungan ber KB serta Pengendalian Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,58	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.78	1.66	1.63	1.61	1.58	1.56	1.56
		Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	2,24	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	Anak	2,33	2,33	2,30	2,27	2,24	2,22	2,22
				Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga (Eselon 3)	Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100

				Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB (Eselon 3)	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber KB	%	90	90	90	90	90	90	90	90
				Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Eselon 3)	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9	9	9	9	9	9	9	9
Misi 5 : Membangun Sinergitas yang Baik antar Tingkat Pemerintahan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,48	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,38	68,40	68,42	68,44	68,46	68,48	68,48	68,48
	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	700	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	skor	550	700	700	700	700	700	700	700
				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan & Anak (Ess 3)	Persentase Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Misi 3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan yang Baik	Persentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan yang Baik	100	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100
					2. Persentase Perencanaan dan Keuangan SKPD.	%	100	100	100	100	100	100	
					3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Skor	70 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75(BB)	75(BB)
					Nilai Reformasi Birokrasi	Skor		60 (B)	70 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
		Nilai Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Reformasi Birokrasi									

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2022
Eselon II			
1.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,58%
2.	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,24 Anak
3.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,48 %
4.	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	Tingkat capaian KLA	Madya
Eselon III			
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi			
1.	Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	100%
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
1.	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	9%
2.	Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur Tentang Ber KB	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB	90%
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Pengaduan	100 %

Sekretaris			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100 %
		Persentase Perencanaan dan Keuangan SKPD	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	75 (BB) Skor
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	75 (BB) Skor
Eselon IV			
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			
1.	Menerima Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan komprehensif	30 kasus
2.	Melakukan Penjangkauan Korban		
3.	Melakukan Pengelolaan Kasus		
4.	Memberikan pendampingan sementara pada korban	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	10 kasus
5.	Memberikan pendampingan pada korban		
6.	Melakukan mediasi pada kasus		
Kasubag. Umum dan Kepegawaian			
1.	Melakukan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	400 Kegiatan
2.	Melakukan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang dipenuhi sesuai aturan	100 Kegiatan
3.	Melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang Terpelihara dan Dimanfaatkan	12 Kali

4.	Menyusun Dokumen Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
Kasubag. Perencanaan dan Keuangan			
1.	Melakukan Penyusunan Laporan Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang disusun tepat waktu	6 Dokumen
2.	Menyusun Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	5 Dokumen

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berbagai program dan kegiatan yang mendukung Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	6.253.882.480,-
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.128.832.656,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.128.832.656,-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.276.874,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.173.848,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.468.932,-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.535.311,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	12.994.708,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.624.075,-

3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,-
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.336.973,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.292.518,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.044.455,-
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.412.800,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.412.800,-
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.023.177,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	16.703.114,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.320.063,-
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	215.934.411,-
1	Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	24.751.590,-
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.751.590,-
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	191.182.821,-

	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	21.027.339,-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	24.547.373,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	7.964.204,-
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	137.643.905,-
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.723.341.676,-
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	826.268.532,-
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.374.800,-
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.980.236,-
1	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	145.318.968,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	166.100.000,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	445.494.528,-
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,-
2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.084.574.005,-
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.084.574.005,-

3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.434.099.139,-
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.889.770,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	431.050.571,-
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.750.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	892.301.016,-
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	41.107.782,-
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	378.400.000,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	378.400.000,-
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.481.507.100,-
1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	999.038.735,-
	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	115.901.357,-

	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	159.998.550,-
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	102.387.201,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.728.220.000,-
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	374.999.992,-
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	497.807.295,-
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.982.422,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	64.982.422,-
2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	394.474.317,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.356.724,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	165.117.593,-

3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,-
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	171.170.679,-
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	171.170.679,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.170.679,-
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	291.711.210,-
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.972,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Penegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.972,-
2	Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	95.768.111,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	95.768.111,-
3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.551.127,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	38.276.358,-

	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	112.274.769,-
VIII	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN	157.501.937,-
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,-
TOTAL		14.792.856.788,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A tahun 2022 yang telah disepakati. Untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, penetapan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90	Memuaskan
III	Diatas 70 sampai dengan 80	Sangat Baik
IV	Diatas 60 sampai dengan 70	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$
	Contoh: Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100$
	Contoh: angka kelahiran total	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. SASARAN RPJMD

RPJMD Kabupaten Tanah Laut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Tabel
Indikator Sasaran Strategis Misi 5

MISI 5 Membangun sinegritas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
13.	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,75	87,28	97,87%

Isu gender merupakan isu multi dimensi meliputi hampir semua aspek dan permasalahan dari berbagai sisi, yaitu: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Isu Gender juga menjadi salah satu poin dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Persoalan gender tercantum sebagai tujuan ke-5 dari 17 tujuan SDGs, yakni: “*mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan*”. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah melalui penerapan Pangarusutamaan Gender (PUG), yang menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan. PUG mendorong kesetaraan gender di seluruh aspek pembangunan melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan serta aspirasi perempuan dan laki-laki, ke dalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender dalam Pembangunan, mengintruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian (K/L), Lembaga Tinggi Negara, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur dan para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pangarusutamaan gender dalam pembangunan.

Untuk mengukur kesetaraan gender dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

perempuan dengan menghitung kualitas dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan digunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran konsumsi.

Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Realisasi indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tahun 2023 adalah 87.28 telah belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 88,75 dengan tingkat capaian 97.87%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai SDGs 8 yaitu :

- Adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor yang tertuang dalam SK Bupati tentang Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga.
- Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung TPK2D terlihat dalam aktifnya masyarakat dalam mengikuti pembinaan-pembinaan.
- Mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga.
- Pembentukan kelompok-kelompok baru industri rumahan di masyarakat.



Keterangan : Foto kegiatan Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tanah Laut Di Desa Sumber Mulia tahun 2022.



Keterangan : Foto kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita dalam rangka Pelatihan Eco Enzim di Kecamatan Tambang Ulang tahun 2022.



Keterangan : Foto kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita dalam rangka Pelatihan Keterampilan Perempuan Pembuatan Pengolahan Tudung Saji tahun 2022.

Faktor Penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender (PUG);.
- Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahanan pembangunan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan lintas sektoral tentang pentingnya pengarusutamaan gender (PUG);
- Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keahlian contohnya pembuatan kain sasirangan.

2. Esselon II (Kepala Dinas)

2.1 Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Nomor : 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Catatan
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,58	1,42	111,27	
$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p><i>Metode geometri</i> <i>r : Laju pertumbuhan penduduk</i> <i>P_t : Jumlah penduduk tahun t</i> <i>P₀ : Jumlah penduduk tahun awal</i> <i>t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)</i></p>							

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023 (pertengahan tahun/Juni) sebesar 361.044 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,42 persen dari tahun 2021. Rasio jenis kelamin pada tahun 2022 sebesar 105,18 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan atau dari 100 perempuan terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki.

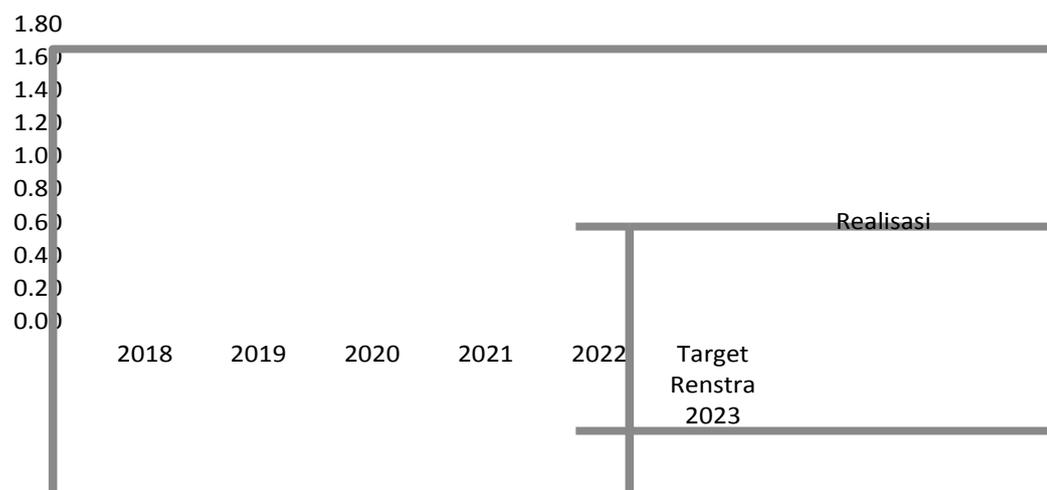
Melihat rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tiap tahun selama lima (5) tahun dari data penduduk tercatat bahwa LPP Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 sebesar 1,42% dari target Renstra sebesar 1,58%, sehingga capaian kinerja terdapat sebesar 111,27%, dan hasil yang diperoleh Tahun 2022 telah

melebihi target akhir Renstra 1,56% (Dapat dilihat pada Tabel di bawah ini). Penurunan ini merupakan sinyal yang baik dalam rangka mendukung program nasional pengendalian jumlah penduduk.

Tabel : Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018 sampai dengan 2022

N o	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET RENSTRA 2023
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,46	1,38	1,59	1,15	1,42	1,56

Sumber data : BPS



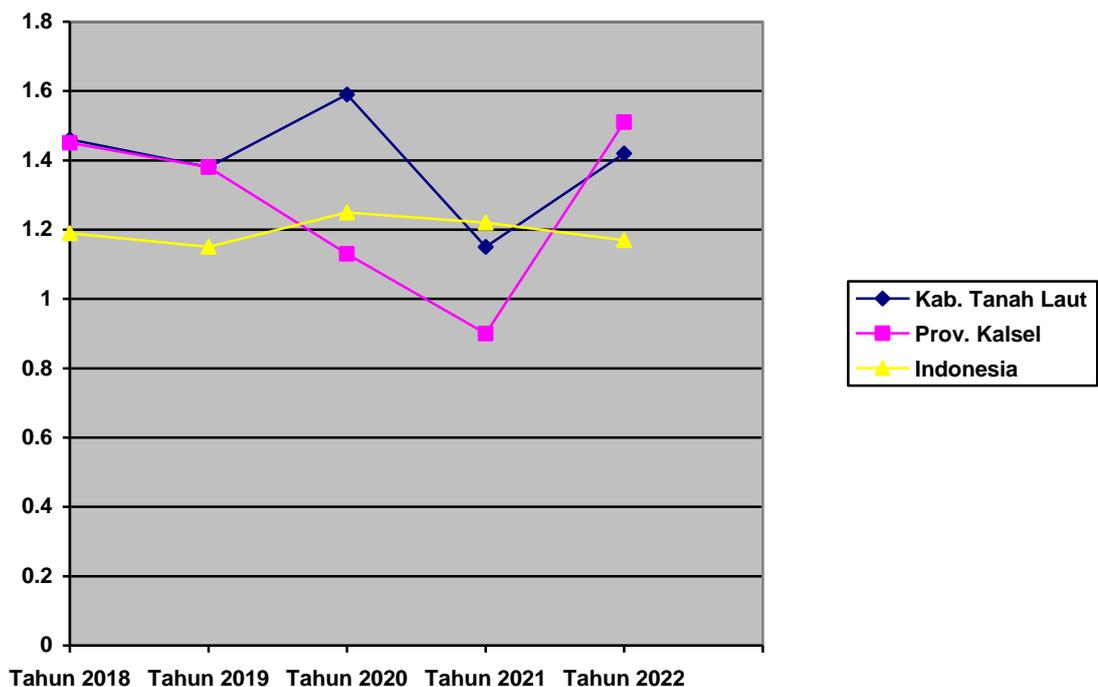
Capaian LPP Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan LPP Provinsi Kalimantan Selatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Nasional dapat dilihat pada tabel

Tabel

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2018 sampai dengan 2022

No	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Kabupaten Tanah Laut	1,46	1,38	1,59	1,15	1,42
2.	Provinsi Kalimantan Selatan	1,45	1,38	1,13	0,9	1,51
3.	Indonesia	1,19	1,15	1,25	1,22	1,17

Sumber data : BPS



Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Tanah Laut bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan maka LPP Kabupaten Tanah Laut lebih rendah di bandingkan LPP Provinsi Kalimantan Selatan namun lebih tinggi dibandingkan LPP secara Nasional.

LPP tidak hanya terkait dengan tingkat kelahiran saja, tetapi juga terkait dengan kematian dan migrasi. LPP merupakan isu lintas sektor/bidang, penguatan peran lintas sektor/bidang dalam mencapai penurunan. Upaya yang

dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah dengan menekan/menurunkan angka kelahiran (TFR).

a. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam rangka pencapaian kinerja antara lain :

1. Membuat Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
2. Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan *stakeholders* untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
3. Membentuk Sekolah Siaga Kependudukan yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana kedalam beberapa pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran:
4. Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas, tahun 2022 telah dibentuk 16 Kampung Keluarga Berkualitas sehingga total Kampung Keluarga Berkualitas yang terbentuk sebanyak 40 Desa dari 135 Desa di Kabupaten Tanah Laut serta di tahun 2022 terbentuk satu Kecamatan berkualitas yaitu Kecamatan Bajuin.
5. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - b. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
6. Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu membuat kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut;

7. Peningkatan Pelayanan Program Keluarga Berencana (KB) sehingga tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran. Pelayanan KB dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit, dan serta bekerja sama dengan Praktek Mandiri Bidan, Tahun 2022 dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Sebanyak merupakan peserta KB Aktif dengan jenis KB yang Paling Banyak di gunakan
8. Melaksanakan kegiatan pelayanan KB Keliling ke masyarakat melalui kegiatan Manunggal Tuntung Pandang, pelayanan pada saat event-event tertentu dengan menggunakan sarana Mobil Pelayanan.
9. Menciptakan berbagai inovasi untuk meningkatkan kegiatan pengendalian penduduk diantaranya :
 - a. Penetapan Inovasi Kampung Keluarga Gagah Berkualitas (GAGATAS) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut
 - b. Penetapan Inovasi Tim Keliling Program Bangga Kencana (TKPBK) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut
10. Beberapa foto kegiatan Tahun 2022 :



Keterangan : Jumat, 09 Desember 2022. Balai Penyuluh KB Kecamatan Bajuin telah melaksanakan Kegiatan Peresmian Rumah Data Kependudukan (RDK) Kampung KB Desa Sungai Bakar, Oleh Bupati Tanah Laut ,dan Pelayanan KB MKJP Gratis Dalam Rangkaian Manunggal Tuntung Pandang Desa Sungai Bakar. Berhadir : Bupati Tanah Laut, Lintas Sektor Kab Tanah Laut, Camat Bajuin, Dinas P2KBP3A Kab Tanah Laut, PKB Kec Bajuin, Kader, Bidan dan Masyarakat Desa Sungai Bakar. Acara bertempat di Gedung Posyandu Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah laut.



Keterangan : *Rabu, 14 Desember 2022.* Balai Penyuluhan KB Kecamatan Jorong telah melaksanakan Kegiatan Peresmian Rumah Dataku Dan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.



Keterangan : *Selasa 08 Februari 2022.* Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pelaihari telah melaksanakan Kegiatan Peresmian Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan PIK Remaja oleh Wakil Bupati Tanah Laut bertempat di Halaman SMPN 1 Pelaihari. dan di hadiri oleh Bapak Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman dan Kaper Bkkbn Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran, Kepala Dinas P2KBP3A beserta jajarannya, Kepala SMPN 1 Pelaihari beserta dewan Guru dan Lintas sektor terkait dari Dinkes, Kominfo, Kemenag, KUA Kecamatan Pelaihari, Camat Pelaihari, Kepala SMP, SMA di Lingkungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.



Keterangan : *Kamis, 20 Oktober 2022.* Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bajuin telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) SMAN 1 Bajuin. Materi yang disampaikan mengenai Cegah Stunting Di Mulai Sebelum Menikah. Narasumber dari MAN IC, Peserta terdiri dari Warga Sekolah SMAN 1 Bajuin
Acara bertempat di SMAN 1 Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Keterangan : *Rabu, 18 Mei 2022.* Balai Penyuluhan KB Kecamatan Takisung telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi pembentukan sekolah siaga kependudukan (SSK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Dihadiri oleh Ibu Nurul Hikmah Sukamta Bupati Tanah Laut beserta Jajarannya Kepala Dinas P2KBP3A beserta Jajarannya, Camat Takisung beserta jajarannya, PKB Kecamatan Takisung, Kepala Sekolah atau yang mewakili beserta Dewan Guru SMK N 1 Takisung Anggota PIK-R kelompok SMEKNETA JAYA. Narasumber : Ibu Nurul Hikmah dan Bapak Khairul Amin dari MAN Insan Cendekia Materi yang disampaikan pentingnya menjadi remaja yang berencana yaitu sekolah, kuliah, kerja baru menikah. Bertempat di SMKN 1 Takisung.



b. Faktor pendukung yaitu :

1. Tersedianya SDM yang mampu mengelola program keluarga berencana termasuk pemberian penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi oleh tenaga penyuluh KB;
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah, organisasi profesi dan mitra kerja dalam mendukung penyelenggaraan program KB dan Kesehatan Reproduksi;
3. Tersedianya jaringan institusi masyarakat (PPKBD/Sub PPKBD, Kelompok kegiatan (Poktan) serta motivator dan kelompok KB Pria) untuk meningkatkan KIE, promosi dan konseling pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
4. Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana kedalam beberapa pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran:

c. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat pada PUS dalam ber KB
2. Peserta KB masih di dominasi perempuan
3. Tingginya pernikahan remaja (< 14 tahun, 15-19 tahun)
4. Rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), KB MKJP kurang diminati dan dipahami oleh masyarakat
5. Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun menggunakan alat kontrasepsi yang kurang efektif (Non MKJP).
6. Angka Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi yaitu 9%
7. Belum optimalnya melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalui jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah.

2. Masih rendahnya kompetensi SDM memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kepada peserta didik. kepada peserta didik.

d. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang pengendalian penduduk, keluarga berencana, melalui website yang dapat di akses semua lapisan masyarakat
2. Melaksanakan Advokasi Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan (MUPEN).
3. Siaran lewat Siaran radio tentang Kependudukan, Keluarga Berencana Memasang Spanduk-spanduk, mencetak Brosur dan Leaflet di bagi ke sekolah-sekolah dan Puskesmas di setiap kecamatan
4. Melaksanakan sosialisasi materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah.
5. Memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kepada pendidik yang menerapkan SSK.
6. Peningkatan sosialisasi secara berkesinambungan kepada peserta didik tentang materi kependudukan melalu jalur Formal dan Informal di setiap Kecamatan / Sekolah
7. Peningkatan penyuluhan untuk memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada peserta didik. secara tatap muka melalui Ajang kreatif Gen-Re (Generasi Berencana),Kegiatan tatap muka dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan (Prokes)

e. Rencana Aksi dalam mencapai sasaran :

1. Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan *stakeholders* untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

2. Membentuk Sekolah Siaga Kependudukan yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana kedalam beberapa pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran:
3. Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas pada desa yang belum mendapat Kampung Keluarga Berkualitas, yaitu 95 desa dari 135 desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut (40 desa sudah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas).
4. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

f. Sumber Daya pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dalam rangka menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk dilaksanakan 2 bidang DP2KBP3A yaitu Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi (PPDI) serta Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) dengan jumlah Sumber Daya Manusia sebanyak 17 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 13 orang dan PTT sebanyak 4 orang.

g. Program yang menunjang kegiatan.

Untuk mencapai sasaran menurunnya laju pertumbuhan penduduk di dukung oleh 2 Program dengan pagu Rp. 4.939.276.087,- dan realisasi sebesar sebesar Rp 4.310.283.010,- atau 87,26% sebagai berikut:

Tabel Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Pengendalian Penduduk	215.934.411	176.116.434	81,56
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.723.341.676	4.134.166.576	87,52
Jumlah		4.939.276.087	4.310.283.010	87,26

Capaian realisasi keuangan program dalam rangka menurunnya laju pertumbuhan penduduk masih belum optimal di karenakan :

1. Pada Program pengendalian penduduk beberapa perjalanan dinas tidak dilaksanakan
2. Pada program pembinaan keluarga berencana terdapat sisa dana pembuatan iklan radio, didalam DPA satuannya 3 juta per iklan, realisasinya hanya 500 ribu periklan dan terdapat sisa pertunjukan daerah.
3. Pada pelayanan KB beberapa mitra kerja (puskesmas) pemberi layanan KB tidak mengajukan klaim pelayanan karena jasa pelayanan telah di klaimkan ke BPJS Kesehatan.
4. Masih rendahnya minat akseptor untuk menggunakan Metode kontrasepsi MOW/MOP dan IUD

h. Penghargaan yang di peroleh dalam rangka Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk.

1. PENGHARGAAN MANGGALA KARYA KENCANA (MKK) KEPADA KETUA TP- PKK KABUPATEN TANAH LAUT

Manggala Karya Kencana (MKK) merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk.

Pada tahun 2022, Ketua TP-PKK Kabupaten Tanah Laut Ny. Hj. Nurul Hikmah Sukamta meraih penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) yang diserahkan pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Medan Sumatera Utara

Penghargaan Manggala Karya Kencana diterima Ketua TP-PKK Kabupaten Tanah Laut Ny. Hj. Nurul Hikmah Sukamta karena telah mempunyai dedikasi, komitmen, dukungan dan dharma baktinya yang besar dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Tanah Laut.

Foto Penyerahan Penghargaan Manggala Karya Kencana



2. PENGHARGAAN KECAMATAN KELUARGA BERKUALITAS PERTAMA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut mendapat Penghargaan Kecamatan Berkualitas Pertama di Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan di berikan atas dasar seluruh Desa di Kecamatan bajuin menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sector terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat

Penghargaan diserahkan oleh Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan kepada Kecamatan Bajuin



3. PENGHARGAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA MAN INSAN CENDIKIA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah Sekolah yang mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan kedalam beberapa mata pelajaran sebagai Pengayaan Materi Pembelajaran, dimana di dalamnya terdapat Pojok Kependudukan.

MAN Insan Cendikia berhasil mendapatkan piala dan penghargaan Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik I Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan



2.2 Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 Tahun (Esselon II)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Catatan
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	anak	2,24	2,12	105,66	Sumber Data Bidang KBKS
$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$							

Angka Kelahiran Total / *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Manfaat TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

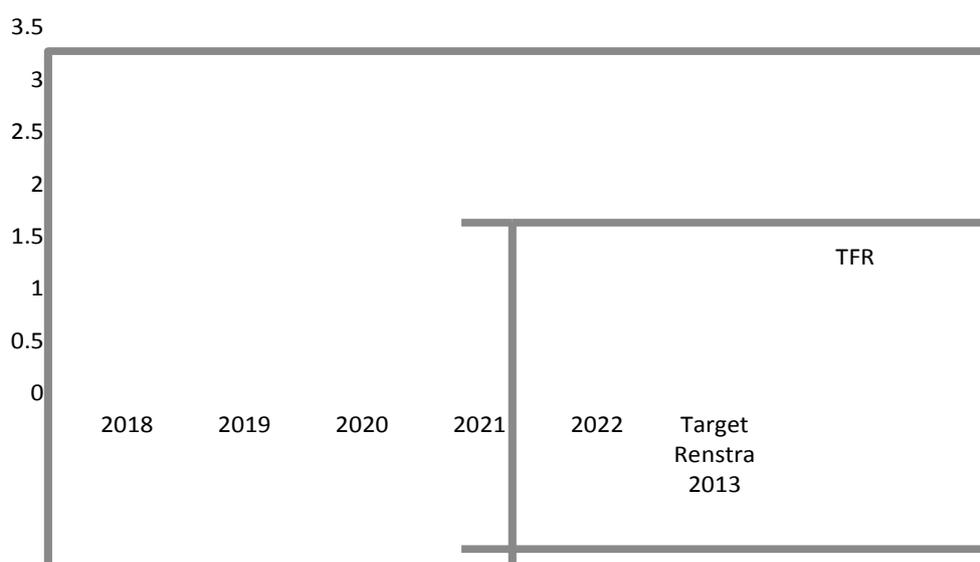
Pada pengukuran target kinerja TFR jika realisasi semakin rendah maka pencapaian kinerja semakin baik. Realisasi indikator TFR tahun 2022 adalah 2,12 anak per WUS (Wanita Usia Subur) , realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu 2,24 anak dengan tingkat capaian 105,66%. TFR sebesar 2,12 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) di Kabupaten Tanah Laut secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya

Realisasi indikator TFR tahun 2022 adalah 2,12 anak per WUS, setiap tahun realisasi TFR semakin rendah sehingga pencapaian target kinerja semakin menuju kearah yang baik dan realisasi Tahun 2022 melebihi target Tahun 2023. TFR tahun 2022 sebesar 2,12 mengalami peningkatan sebesar 0,2 di bandingkan tahun 2021.

Realisasi Kinerja TFR Tahun 2022 telah melebihi target renstra tahun 2023, untuk itu maka kinerja perlu di pertahankan.

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET RENSTRA 2023
2.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun	2,54	2,99	2,51	2,32	2,12	2,22



Selama lima tahun terakhir, TFR di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan dari 2,54 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-49 tahun di Tahun 2018, menjadi 2,12 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-49 tahun di Tahun 2022. Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan

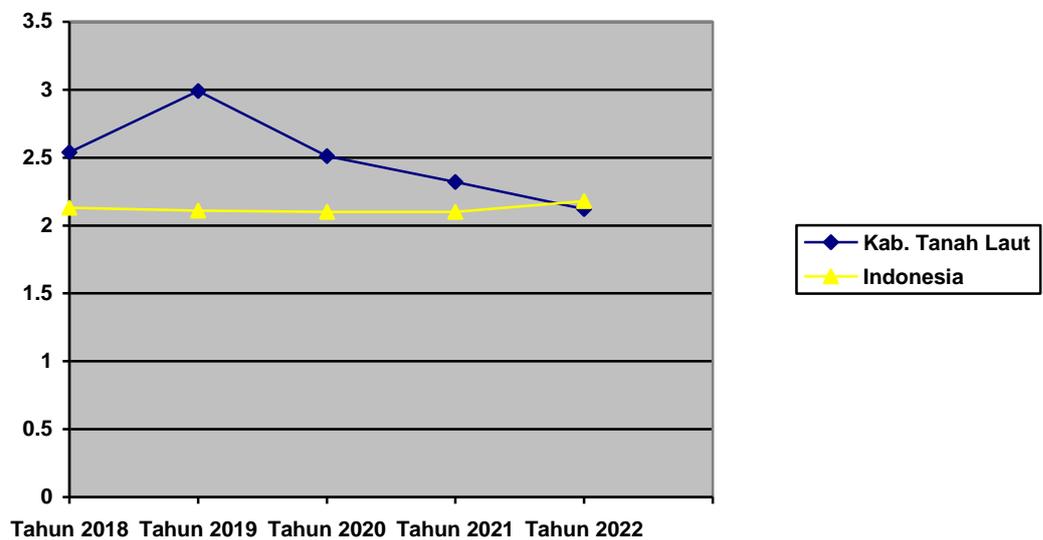
Capaian TFR Kabupaten Tanah Laut dibandingkan TFR Nasional dapat dilihat pada tabel

Tabel

TFR Kabupaten Tanah Laut dibandingkan Nasional Tahun 2018 sampai dengan 2022

No	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Kabupaten Tanah Laut	2,54	2,99	2,51	2,32	2,12
2.	Indonesia	2,13	2,11	2,10	2,10	2,18

Sumber data : BPS



Angka Kelahiran Total / *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar 2,12 anak per WUS lebih rendah di bandingkan Nasional yaitu 2,18 anak per WUS.

a. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Tahun 2022 antara lain :

1. Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana.
2. Penggerakan kader institusi masyarakat (PPKBD/Sub PPKBD, Kelompok kegiatan (Poktan)

3. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaring.
4. Peningkatan Kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) diantaranya yaitu :
 - Pelayanan pemasangan KB Implant, IUD, MOW dan MOP
 - Peningkatan Pelayanan Program Keluarga Berencana (KB). Pelayanan KB dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit, dan serta bekerja sama dengan Praktek Mandiri Bidan, Tahun 2022 Dinas P2KBP3A Bekerjasama dengan Puskesmas, 2 Rumah Sakit pemerintah yaitu RS. H. Boejasin dan RS. KH. Mansyur serta 1 Bidan Praktek Mandiri
 - Melaksanakan kegiatan pelayanan KB Keliling ke masyarakat melalui kegiatan Manunggal Tuntung Pandang, pelayanan pada saat event-event tertentu dengan menggunakan sarana Mobil Pelayanan
 - Melaksanakan evaluasi pelayanan KB
5. Penyediaan penunjang pelayanan KB yaitu :
 - Pengadaan minilaparotomi/tubectomy set yang di serahkan ke RS untuk mendukung/meningkatkan kualitas layanan KB
 - Melakukan rehabilitasi pada Balai Penyuluh KB sebanyak 7 Balai
6. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaring.
7. Promosi dan konseling Kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di faslitas Kesehatan
8. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
9. Membentuk Kelompok Kegiatan di setiap desa yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK-R.
10. Beberapa foto-foto kegiatan :



Keterangan : Foto Bupati Tanah Laut meninjau kegiatan Pelayanan KB MOW dalam rangka Hari Keluarga Nasional

Keterangan : Foto Kegiatan Pelayanan KB Luar Gedung pada kegiatan Bhakti Soaisal TNI AL di Desa Tabanio



Keterangan : Foto Orientasi Kespro Peningkatan Pelayanan KB Khusus Pasca persalinan dalam upaya pencegahan stunting bagi tenaga kesehatan di Faskes

Keterangan : Foto Pembinaan Kader Kelompok Bina Keluarga Balita



b. Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Tersedianya SDM yang mampu mengelola program keluarga berencana termasuk pemberian penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi oleh tenaga penyuluh KB.
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah, organisasi profesi dan mitra kerja dalam mendukung penyelenggaraan program KB dan Kesehatan Reproduksi.
3. Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang yang memfasilitasi pelayanan KB kepada masyarakat.
4. Tersedianya jaringan institusi masyarakat (PPKBD/Sub PPKBD, Kelompok kegiatan (Poktan) serta motivator dan kelompok KB Pria) untuk meningkatkan KIE, promosi dan konseling pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
5. Tersedianya Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana (MUYAN) yang dapat memudahkan akses Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang jenis Implan dan IUD.
6. Tersedianya Mobil box distribusi Alokon untuk distribusi Alokon ke Fasilitas Kesehatan memadai (Mobil Alokon).



Keterangan : Foto Mobil Box Distribusi Alokon untuk mengantar Alat dan obat kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan

Keterangan : Foto Kegiatan pelayanan KB Luar gedung pada kegiatan Review Program Bangga Kencana Tk Provinsi menggunakan Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana (MUYAN)



c. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Eksternal

Penguatan advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pelaksanaannya masih menemui permasalahan antara lain :

- Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program Bangga Kencana, yaitu terkait kelembagaan , kebijakan, perencanaan
- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga
- Pelaksanaan Advokasi dan KIE belum efektif ditandai dengan pengetahuan masyarakat tentang KB dan alat kontrasepsi dan pasangan usia subur /PUS tidak diikuti dengan menjadi peserta KB.
- Masih belum optimalnya penyampaian informasi mengenai program Bangga Kencana

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB

- Angka pemakaian kontrasepsi cara modern belum meningkat secara signifikan
- Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) cukup tinggi
- Penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) terus meningkat sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah

3. Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga belum meningkat ditandai

- dengan 1) masih banyaknya perkawinan diusia muda 2. Angka kelahiran pada pada perempuan remaja usia 15 – 19 tahun cukup tinggi.
4. Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
 - Partisipasi dan pemahaman dan kesadaran keluarga / orang tua yang memiliki remaja masih rendah
 - Kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia belum optimal
 - Kelompok kegiatan (Poktan) terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber KB
 5. Faktor SDM yaitu terbatasnya Tenaga Penyuluh KB yang ada, seharusnya satu Penyuluh KB menangani satu desa namun kondisi saat ini satu Penyuluh KB menangani 3 sampai 5 Desa
 6. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan program Bangga Kencana belum optimal.

d. Rencana Aksi dalam mencapai sasaran Tahun 2023 antara lain :

1. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif.
2. Pendewasaan usia perkawinan (PUP).
3. Membentuk Kelompok Kegiatan di setiap desa yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK-R.
4. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
 - Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
 - Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - Peningkatan KB Pria

e. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan *stakeholders* untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
2. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - Peningkatan penyebaran materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif melalui strategi:
 - Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR
 - Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - Menjamin ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di fasilitas kesehatan
4. Mengusulkan Penambahan formasi PLKB.

f. Sumber Daya pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dalam rangka Angka Kelahiran Total / *Total Fertility Rate* (TFR) 2 bidang DP2KBP3A yaitu Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) serta Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi (PPDI) dengan jumlah Sumber Daya Manusia sebanyak sebanyak 17 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 13 orang dan PTT sebanyak 4 orang.

g. Program yang menunjang kegiatan.

Dalam mencapai sasaran Strategis Dinas P2KBP3A memiliki 2 (dua) program yaitu program Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan dana sebesar Rp. 7.204.848.776,- terealisasi sebesar Rp. 5.429.414.377,- capaian kinerja 75,36%

Tabel Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.723.341.676	4.134.166.576	87,52
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.481.507.100	1.294.974.801	52,19
Jumlah		7.204.848.776	5.429.414.377	75,36

Capaian realisasi keuangan program dalam rangka menurunnya Angka Kelahiran Total/ TFR masih belum optimal di karenakan :

1. Pada pelayanan KB beberapa mitra kerja (puskesmas) pemberi layanan KB tidak mengajukan klaim pelayanan karena jasa pelayanan telah di klaimkan ke BPJS Kesehatan.
2. Masih rendahnya minat akseptor untuk menggunakan Metode kontrasepsi MOW/MOP dan IUD
3. Rendahnya capaian Pelaksanaan pendampingan calon pengantin di desa target 5.092 kali terrealisasi sebanyak 314 kali hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat/Catin tentang Program Pemerintah mengenai aplikasi Elsimil dan pendampingan sehingga masih ada catin yang tidak bisa terdeteksi.

i. Penghargaan yang di peroleh dalam rangka Menurunkan Angka Kelahitran Total / Total Fertility Rate (TFR).

1. **Juara 2 BKR Ceria Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari pada Lomba Apresiasi Kelompok Bina Keluarga Remaja Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan**



2. **Juara 1 Kelompok PIK Remaja Berani (SMPN 1 Pelaihari) pada Lomba Apresiasi Kelompok PIK Remaja Unggulan (SMP) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan**



3. **Juara 2 Kelompok PIK Remaja Cendrawasih (SMAN 1 Pelaihari) pada Lomba Apresiasi Kelompok PIK Remaja Unggulan (SMA) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan**



2.3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender (Esselon II) Nomor : 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Catatan
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	68,42	72,86	106,23	
1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Keterangan : Ipar = Indeks Keterwakilan diparlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Linc-dis = Indeks distribusi Pendapatan							

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, terutama kepada perempuan kepala rumah tangga. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bekerja sama dengan organisasi wanita Kabupaten Tanah Laut telah mengadakan berbagai macam pelatihan untuk masyarakat (perempuan), khususnya perempuan kepala rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian keluarga yaitu :

1. Pelatihan Industri Rumahan Pengolahan Kerupuk, Pentol Ikan, Dan Amplang Bagi Kepala Keluarga Perempuan Dan Perempuan Rentan yang ada di Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari
2. Pembinaan ke Industri Rumahan Pembuatan Sasirangan "Fanasa" Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati

3. Pembinaan industri rumahan pembuatan makanan berbahan singkong di desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang
4. Pembinaan ke kelompok industri rumahan pembuatan sambal kacang dan jamu desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar.
5. Pembinaan ke kelompok industri rumahan pembuatan sasirangan “Fanesa” Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati.
6. Pembinaan ke kelompok industri rumahan pembuatan sasirangan “Fanesa” Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati.

Keterangan :



Keterangan : Foto Pembinaan ke Industri Rumahan Pembuatan Sasirangan “Fanesa” Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati

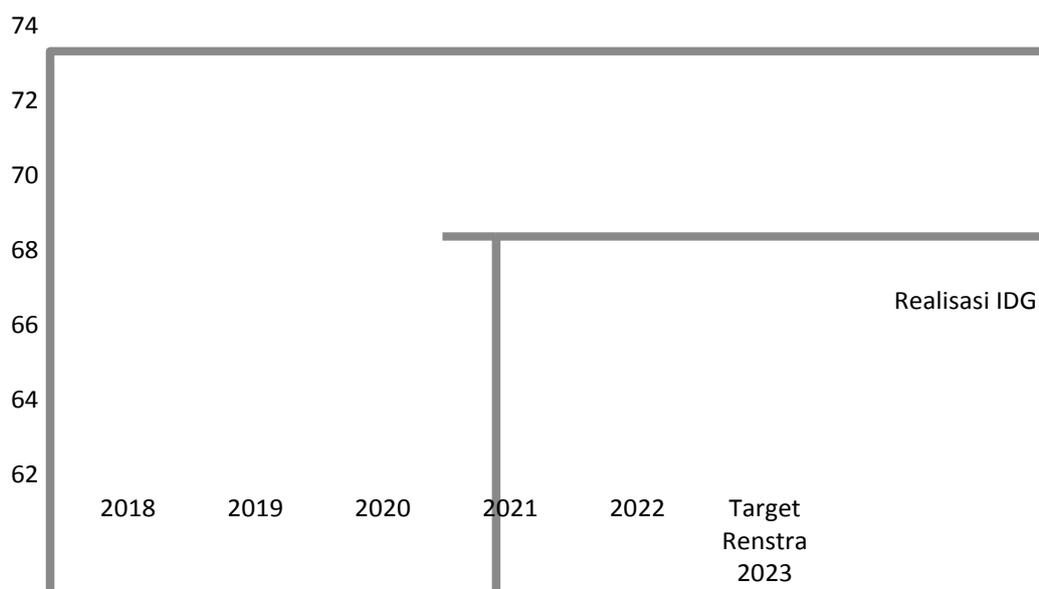


Realisasi Indikator Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 sebesar 72,86 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 68,42 atau capaian kinerja sebesar 106%. Melihat realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 semakin tahun semakin meningkat dan telah melampaui target renstra tahun 2023.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan 2022

No	Uraian	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET RENSTRA 2023
1	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	65,95	70,67	70,67	72,86	72,86	68,48

Sumber : BPS



Capaian IDG Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan capaian IDG Kalimantan Selatan dan capaian IDG Nasional maka IDG yang telah dicapai Kabupaten Tanah Laut masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan IDG Nasional yaitu terdapat dalam table

Tabel

Capaian Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, dibandingkan dengan Capaian Provinsi, dan Capaian Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN KALSEL	CAPAIAN KABUPATEN TANAH LAUT
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	76,26	74,58	72,86

a. Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran antara lain :

1. Penyempurnaan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan agar selalu mendapat masukan dari perspektif gender.
- b. Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan daerah agar berspektif gender.

- c. Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam menerapkan PUG.
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG.
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat.
- f. Penguatan system penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah.
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.
- h. Pendekatan pembangunan yang mengkoordinir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
- i. Mengupayakan perbaikan terhadap posisi perempuan dalam kependudukan di masyarakat melalui peningkatan pemahaman pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan.
- j. Melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan ada keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.



Keterangan : Foto kegiatan Launching Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) di Desa Ramah Perempuan dan Anak tanggal 02 Maret 2022.



Keterangan : Foto kegiatan Pembinaan ke Kelompok Home Industri Perempuan tanggal 14 Maret 2022.

b. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender (PUG).
2. Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahanan pembangunan.

c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Melakukan sosialisasi keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender (PUG).
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahanan pembangunan.

d. Sumber Daya pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dalam rangka Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender dilaksanakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta UPTD PPPA dengan jumlah Sumber Daya Manusia sebanyak 11 Orang yang terdiri dari 8 orang ASN dan 3 orang PTT Daerah.

c. Program yang menunjang kegiatan.

Dalam mencapai sasaran Strategis Dinas P2KBP3A memiliki 2 (dua) program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan dengan dana sebesar Rp269.776.706 terealisasi sebesar Rp.186.337.030 capaian kinerja 69,09 %

Tabel Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	157.501.937	134.845.030	86
2	Program Perlindungan Perempuan	112.274.769	51.532.000	33,08
Jumlah		269.776.706	186.377.030	69,09

Capaian realisasi keuangan program dalam rangka Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender masih belum optimal dikarenakan :

1. Pada program perlindungan perempuan layanan yang di berikan sesuai dengan kebutuhan korban / pengaduan

2.4 Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak (Esselon II)

Nomor : 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi (%)	Capaian Kinerja	Catatan
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Skor	700 (Madya)	551 (Pratama)	78,71	
➔ Tingkat Penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian <ol style="list-style-type: none">1. KLA Tingkat Pratama (nilai 500-600)2. KLA Tingkat Madya (nilai 601-700)3. KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800)4. KLA Tingkat Utama (nilai 801-900)5. KLA (nilai 901-1000)							

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Kota Layak Anak (KLA) mempunyai tujuan yaitu :

- Secara Umum : Untuk memenuhi hak dan melindungi anak
- Secara Khusus : Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

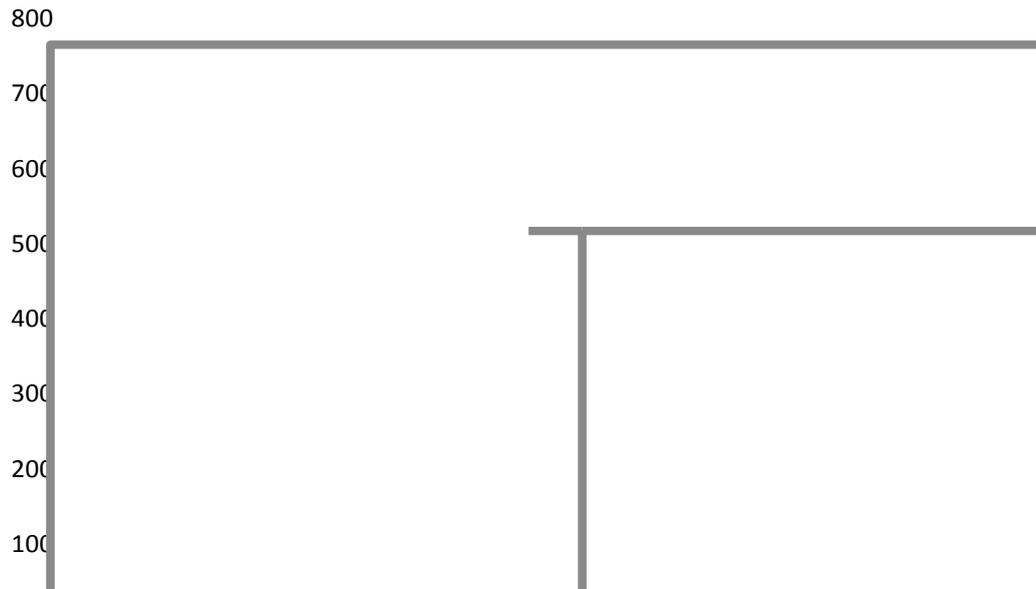
Indikator Kota Layak Anak KLA terdiri dari:

- 1) Merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA.
- 2) Merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA
- 3) Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu
 - Hak Sipil dan Kebebasan
 - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
 - Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
 - Perlindungan khusus

Sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut baru bisa mempertahankan penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan predikat Pratama.

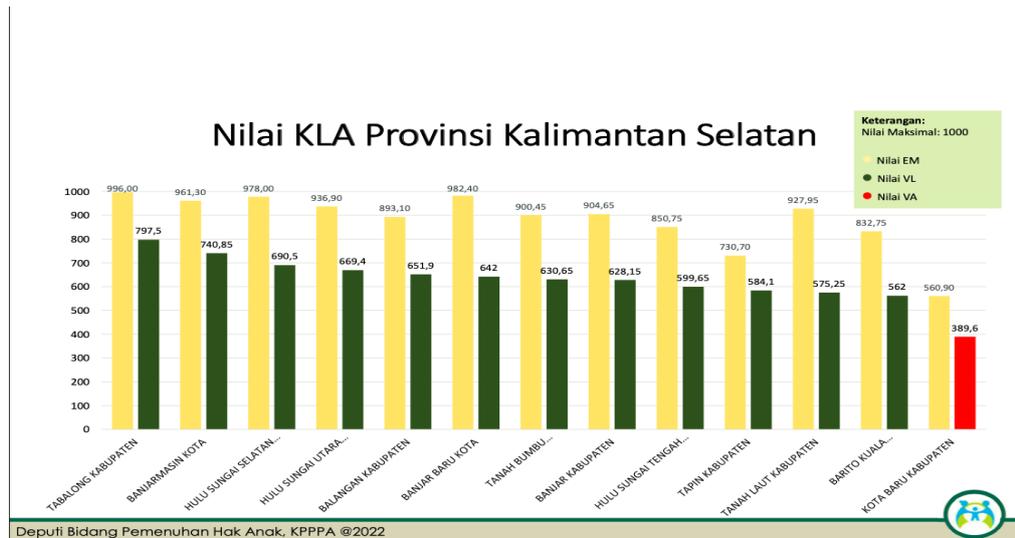
Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET RENSTR A 2023
4.	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak	541,70 (Pratama)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	575,25 (Pratama)	700 (Madya)



Tahun 2022 sebanyak 320 daerah mendapat penghargaan kabupaten/kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Penghargaan diberikan 8 kota mendapatkan KLA Kategori Utama, 66 kabupaten/kota peraih kategori KLA tingkat Nindya, 117 kabupaten/kota peraih Kategori KLA tingkat Madya, dan 121 kabupaten/kota peraih kategori KLA tingkat Pratama. Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim Kementerian PPPA, tim kementerian/Lembaga, dan tim independent.

Hasil evaluasi Kota Layak Anak di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 yaitu : sebanyak 2 kabupaten mendapat predikat Nindya (Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarmasin), 6 kabupaten mendapat predikat Madya (Kabupaten Balangan, Banjarbaru, HSS, HSU, Tanah Bumbu, Banjar), 4 kabupaten mendapat predikat Pratama (Kabupaten Tanah Laut, HST, Tapin dan Barito Kuala) dan 1 Kabupaten tidak mendapat predikat (Kabupaten Kota Baru)

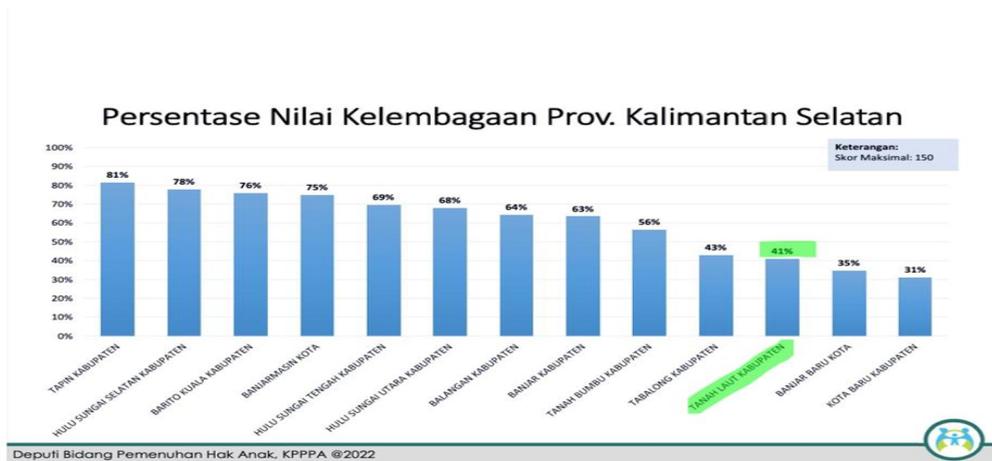


Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dengan kriteria predikat **Pratama** (575,25) dari target **Madya** (700).

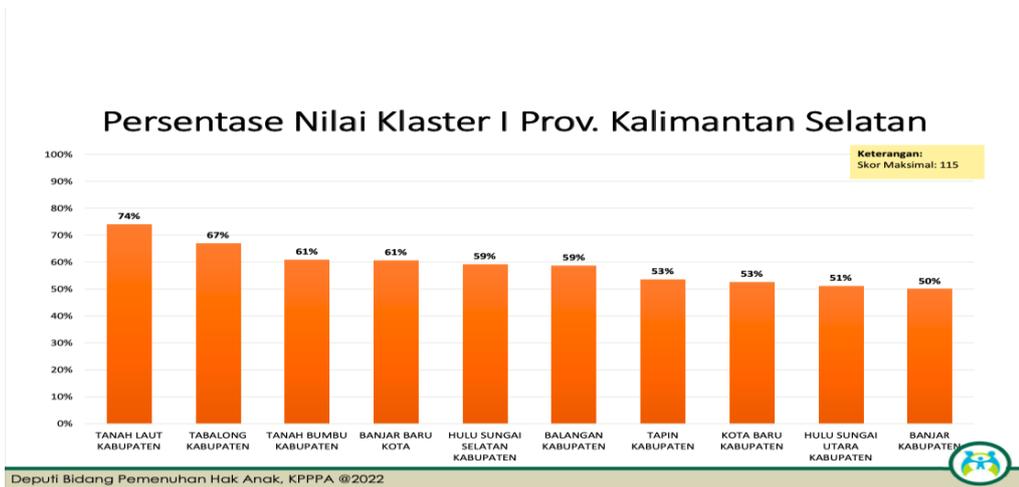
Nilai Evaluasi KLA 2022					
Kabupaten/Kota: KABUPATEN TANAH LAUT					
Provinsi: KALIMANTAN SELATAN					
NO	KLASTER NAMA	MAX	EM	VA	VL
1	Kelembagaan	150.00	150.00	61.10	61.10
2	Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan	115.00	115.00	85.00	85.00
3	Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	170.00	169.00	101.50	101.50
4	Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150.00	123.50	99.10	99.10
5	Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	110.00	93.00	56.60	56.60
6	Klaster V: Perlindungan Khusus	205.00	200.50	95.00	95.00
7	Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	100.00	76.95	76.95	76.95
TOTAL		1000.00	927.95	575.25	575.25

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota seluruh Kalimantan Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

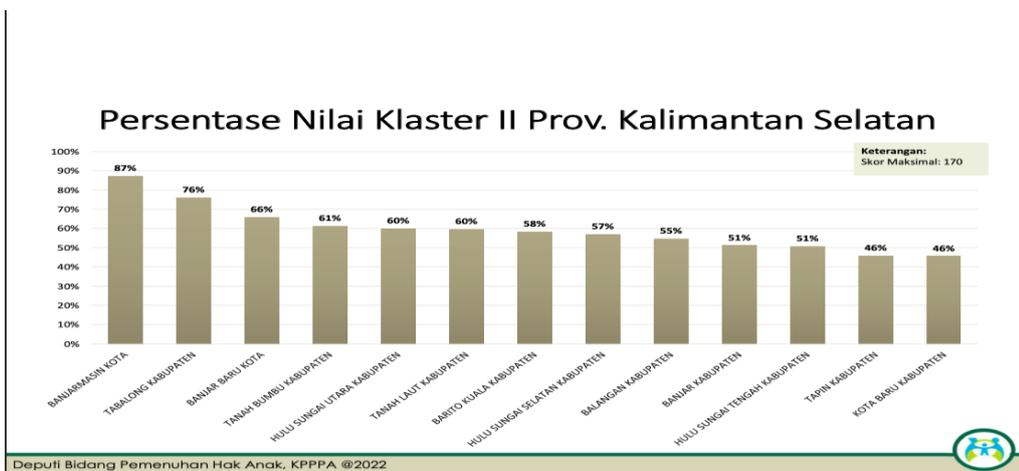
1. Kluster Kelembagaan



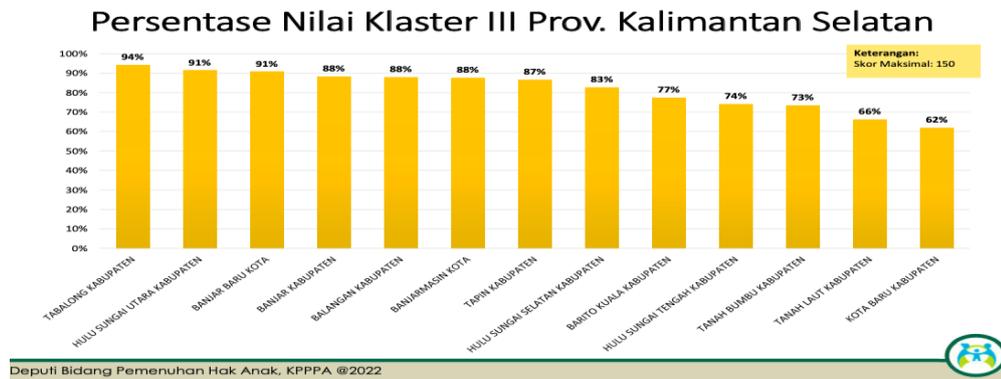
2. Kluster I : Hak Sipil dan Kebebasan



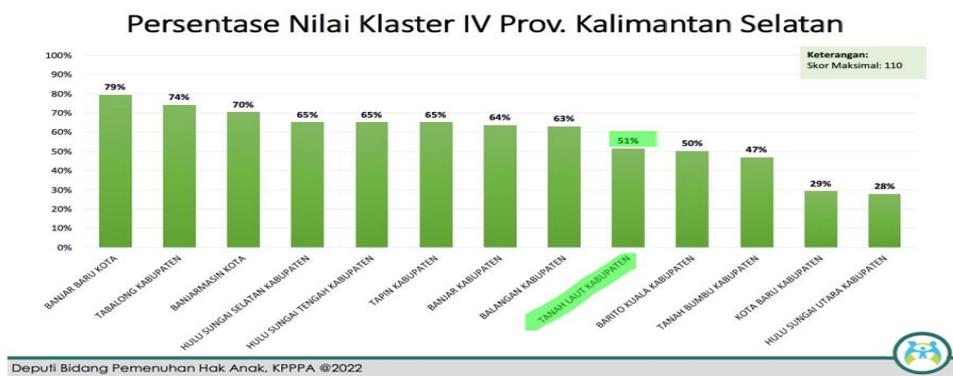
3. Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif



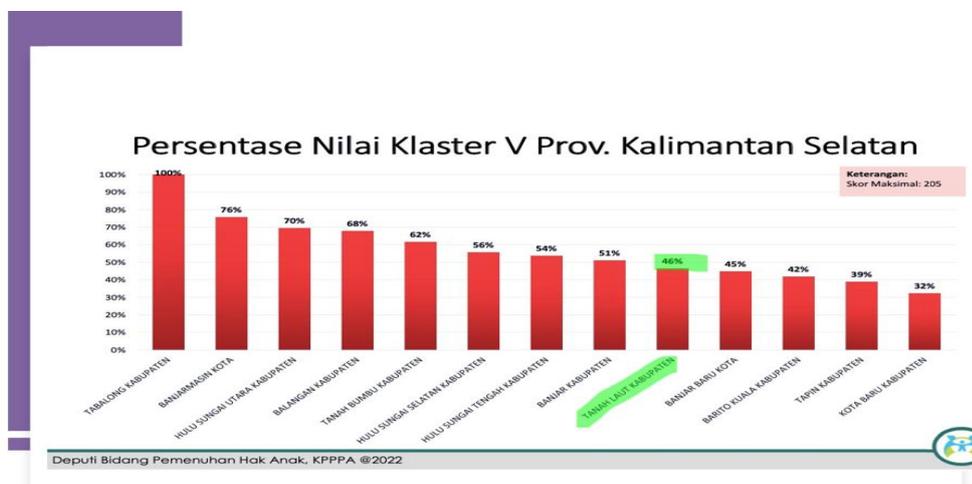
4. Kluster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan



5. Kluster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya



6. Kluster V : Perlindungan Khusus



7. Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak



a. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Tahun 2022 antara lain :

Dinas P2KBP3A dalam rangka menciptakan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak

No	Kecamatan	GT Kelana	Tahun
1	Pelaihari	sudah	2019
2	Bajuin	sudah	2020
3	Takisung	sudah	2019
4	Batu Ampar	sudah	2020
5	Jorong	sudah	2019
6	Kintap	sudah	2019
7	Tambang Ulang	sudah	2019
8	Bati-Bati	sudah	2019
9	Kurau	sudah	2020
10	Bumi Makmur	sudah	2019
11	Panyipatan	sudah	2020

2. Pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak, 7 dari 130 Desa dan 5 Kelurahan se - Kabupaten Tanah Laut. Desa yang telah terbentuk:

- Desa Handil Labuan Amas, tahun 2019
- Desa Muara Kintap, tahun 2019
- Desa Jilatan, tahun 2020
- Desa Jilatan Alur, tahun 2020
- Desa Gunung Raja, tahun 2020
- Desa Pantai Linuh, tahun 2020
- Desa Sungai Rasau, tahun 2019

3. Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), 22 dari 130 Desa dan 5 Kelurahan. Desa yang telah terbentuk:

No	Kecamatan	PATBM	Tahun
1	Pelaihari	Desa Sumber Mulia	2022
		Desa Kampung Baru	2018
		Desa Telaga	2018
		Desa Bumi Jaya	2018
2	Bajuin	Desa Tebing Siring	2021
		Desa Tanjung	2020
3	Takisung	Desa Banua Tengah	2022
		Desa Telaga Langsung	2019
4	Batu Ampar	Desa Ambawang	2022
5	Jorong		
6	Kintap	Desa Muara Kintap	2020
7	Tambang Ulang	Desa Pulau Sari	2022
		Desa Bingkulu	2019
		Desa Martadah Baru	2018
		Desa Gunung Raja	2020
8	Bati-Bati	Desa Banyu Irang	2022
		Desa Nusa Indah	2022
		Desa Ujung Baru	2022
9	Kurau	Desa Sarikandi	2022
10	Bumi Makmur	Desa Handil Maluka	2022
		Desa Handil Labuan Amas	2020
		Desa Sungai Rasau	2020
11	Panyipatan		

4. Pembentukan Forum Anak Daerah (FAD)

Membentuk Forum Anak Daerah di Kabupaten Tanah Laut :

- Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut (2019 – 2021 dan 2022 – 2024)
- Forum Anak Daerah Kecamatan Panyipatan (2022)

Tim Pengurus Forum Anak Daerah di bawah Pembinaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut bertugas :

- a. Merencanakan rencana kerja kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan hak anak di Kabupaten Tanah Laut,
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerjasama lintas sector dalam rangka penguatan data yang dihasilkan
- c. Melaksanakan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan hak anak di Kabupaten Tanah Laut

5. Memfasilitasi terbentuknya Sekolah Ramah Anak

Telah terbentuk sekolah ramah anak melalui SK Bupati Tanah Laut sebanyak 24 sekolah yang terdiri dari PAUD sebanyak 1 sekolah, TK sebanyak 4 sekolah, SD sebanyak 11 sekolah dan SMP sebanyak 8 sekolah.

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun
1	UPTD TK Negeri Pembina	Pelaihari	2018
2	UPTD PAUD SKB	Pelaihari	2018
3	UPTD Bhayangkari	Pelaihari	2018
4	UPTD SDN Atu-Atu	Pelaihari	2018
5	UPTD SDN Pabahanan	Pelaihari	2018
6	UPTD SDN 4 Angsau	Pelaihari	2018
7	UPTD SDN Ambungan	Pelaihari	2018
8	SDIT Assalam	Pelaihari	2018
9	UPTD SDN 1 Nusa Indah	Bati-Bati	2019
10	UPTD SMPN 2 Bati-Bati	Bati-Bati	2019
11	UPTD SMPN 1 Pelaihari	Pelaihari	2019
12	UPTD SMPN 2 Pelaihari	Pelaihari	2019
13	UPTD SMPN 3 Pelaihari	Pelaihari	2019
14	UPTD SMPN 1 Takisung	Takisung	2019
15	UPTD SMPN 6 Bati-Bati	Bati-Bati	2020
16	UPTD SDN 2 Bumi Jaya	Pelaihari	2020
17	UPTD SDN 1 Pulau Sari	Tambang Ulang	2020
18	UPTD SDN 1 Ranggung Dalam	Takisung	2020
19	UPTD SDN 1 Tajau Pecah	Batu Ampar	2021
20	UPTD SDN Bluru	Batu Ampar	2021
21	UPTD TK Negeri Pembina	Bajuin	2021
22	UPTD TK Negeri Pembina	Batu Ampar	2021
23	UPTD SMPN 1 Batu Ampar	Batu Ampar	2021
24	UPTD SMPN 1 Jorong	Jorong	2021

6. Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta kegiatan penguatan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

7. Pencegahan Pernikahan Anak

Dinas P2KBP3A Tanah Laut dan Pengadilan Agama Pelaihari telah menandatangani perjanjian kerja sama mengenai program Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Nikah dimana hasil konseling pemohon dispensasi nikah dengan konselor yang telah ditunjuk oleh Dinas P2KBP3AA Tanah Laut menjadi salah satu syarat wajib untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dan juga sebagai rekomendasi atau

pertimbangan bagi Pengadilan Agama Pelaihari dalam memberikan keputusan atas pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Diwajibkannya konseling bagi pemohon dispensasi nikah merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak. Komitmen perlindungan anak dengan meminimalisir pernikahan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, melainkan semua *stakeholder* terkait harus ikut berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak. Hanya dengan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak maka praktek pernikahan anak dapat terhapuskan dengan lebih terstruktur, holistik, dan integratif. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengubah pandangan masyarakat mengenai pernikahan anak.

8. Pemenuhan Hak Anak akan identitas

Dinas P2KBP3A melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut membantu dalam proses pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA), dan kartu keluarga kepada salah satu klien anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yaitu hak identitas diri.

Anak yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran maka secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara karena namanya tidak tercatat silsilah dan kewarganegaraannya sehingga keberadaannya tidak terlindungi. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dapat menyebabkan resiko eksploitasi anak semakin tinggi, anak bisa menjadi korban perdagangan manusia dan rentan mengalami kekerasan.

Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Karena begitu pentingnya pencatatan sipil anak, maka pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak seutuhnya, salah satunya dengan berupaya memberikan hak anak yang paling mendasar yakni hak sipil dengan mendapatkan pencatatan kelahiran anak.

9. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur

Peraturan tentang pekerja anak telah tertuang dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut tercantum ketentuan mengenai larangan bagi siapapun termasuk orang tuanya sendiri untuk mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 76l Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Sanksi terhadap orang tua atau siapa pun yang mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Anak-anak Indonesia memiliki hak yang sama yang harus dipenuhi dan dilindungi demi kepentingan terbaik anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

b. Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi penggarapan Gugus Tugas KLA di Kecamatan/Desa kerjasama dengan Camat, Kepala Desa dan unsur muspika.
2. Mencetak Leaflet, Brosur, Spanduk tentang Kota Layak Anak (KLA).
3. Siaran lewat media elektronik, siaran radio tentang KLA.
4. Pembuatan Baliho.
5. Melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 11 kecamatan.

c. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Belum semua sekolah dan puskesmas di Kabupaten Tanah Laut didesain Ramah terhadap Anak.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) selalu berganti dikarenakan promosi dan mutasi jabatan, sedangkan SDM tersebut sebagai penggerak program khususnya Gugus Tugas Kota Layak Anak baik di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
3. Belum maksimal peran di luar pemerintah seperti : Dunia Usaha, Lembaga masyarakat dan media.

c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan menciptakan inovasi baru dan terobosan seperti bekerjasama dengan lembaga Pendidikan Ramah Anak menggandeng Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap Sekolah.
2. Mengoptimalkan peran satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPPA) di lingkungan masyarakat.



Keterangan : Foto Kegiatan Jambore Forum ANak Daerah thn 2022



Keterangan : Foto koordinasi terkait kasus persetubuhan anak dibawah umur dengan bapas dan peksos dan polres tanah laut

Keterangan : Foto Koordinasi dengan Pihak Sekolah terkait Kasus Persetubuhan Anak



Dalam mencapai sasaran Strategis Dinas P2KBP3A memiliki 2 (dua) program yaitu Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak dengan dana sebesar Rp **668.977.974,-** terealisasi sebesar Rp. **340.218.435,-** capaian kinerja **50,86%**.

Tabel Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Perlindungan Khusus Anak	497.807.295	232.637.619	46,73
2	Program Pemenuhan Hak Anak	171.170.679	107.580.816	62,85
Jumlah		668.977.974	340.218.435	50,86

Capaian realisasi keuangan program dalam rangka Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak masih belum optimal di karenakan :

1. Pada program perlindungan khusus anak Alokasi dana untuk biaya pelayanan diberikan sesuai dengan pengaduan yang ada dan diberikan sesuai dengan kebutuhan.
2. Pada program pemenuhan hak anak hanya kegiatan sosialisasi Kota Layak Anak yang tidak dilaksanakan dikarenakan uang harian tidak ada dan masih ada beberapa perjalanan dinas yang tidak terlaksana.

4. Esselon III (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi) B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Catatan
1	Meningkatnya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Persentase Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	%	100	100	100	
<p><u>Jumlah informasi data mikro keluarga di desa/Kel yang tersedia</u> x 100% Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga di desa/Kel..</p> <p> $\frac{1 \text{ Dukomen}}{1 \text{ Dukomen}} \times 100 = 100\%$</p>							

Tahun 2022 target penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan sebesar 100% dan terealisasi 100% berupa satu (1) buah dokumen.

a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET RENSTRA 2023
1.	Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	100

Rata-rata capaian kinerja bidang pengendalian penduduk, data dan informasi sudah terealisasi 100%.

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan target tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dari indikator Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tercapai 100% yang berupa sebuah dukomen.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder Pendataan Keluarga;
- Menyediakan sarana dan prasaran pendataan keluarga sesuai dengan kebutuhan;
- Mendaya-gunakan sumber daya yang ada di lini lapangan;
- Meningkatkan kompetensi SDM pelaksana Pendataan keluarga;
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Pendataan Keluarga.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu:

- Belum optimalnya Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder Pendataan Keluarga;
- Terbatasnya sarana dan prasaran pendataan keluarga sesuai dengan kebutuhan;
- Belum optimalnya Mendaya-gunakan sumber daya yang ada di lini lapangan;
- Terbatasnya kompetensi SDM pelaksana Pendataan keluarga;
- Belum optimalnya Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Pendataan Keluarga.

Upaya/Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu:

- Melakukan sosialisasi dan koordinasi Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder Pendataan Keluarga;
- Membentuk Tim Posko koordinasi Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder Pendataan Keluarga;

- Meyelenggarakan Pelatihan dan Pengembangan sumber daya yang ada di lini lapangan;
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Pendataan Keluarga melalui berbagai media. Seperti Siaran radio, Surat Kabar, baliho dan media lainnya.

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tercapai 100% yang di laporkan oleh PPL-KB setiap bulan kepada bidang pengendalian penduduk, data dan informasi sehingga hasil laporan data tersebut di rekap menjadi sebuah dulomen data dan informasi.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :

N O	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGITAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	Program Pengendalian Penduduk	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.751.590,-	13.158.730,-	53
			1. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	21.027.339,-	13.300.203,-	63,25
		2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	24.547.373,-	19.786.391,-	80,60
			3. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	7.964.204,-	7.963.407,-	100
			4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	137.643.905,-	121.907.703,-	89
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan	1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.374.800,-	4.266.800,-	98

(KB)	Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.980.236,-	24.100.424,-	96
		3. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	145.318.968,-	97.937.265,-	67
		4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	166.100.000,-	129.345.000,-	78
		5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	445.494.528,-	414.367.723	93
		6. Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,-	20.800.000,-	52
	2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.084.574.005,-	2.067.064.141,-	99
	3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	378.400.000,-	287.885.000,-	76
JUMLAH			3.505.176.948	3.221.882.787	92

d. Realisasi Anggaran Program

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi tahun 2022 pagu sebesar Rp. 3.505.176.948,- terealisasi sebesar Rp. 3.221.882.787,- dengan capaian 92%.

5. Esselon III (Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Catatan
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	9	11,71	76,86	Sumber data Bidang KBKS
2	Meningkatnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber-KB	Persentase pasangan Usia Subur yang ber-KB	%	90	74,68	82,98	
1.	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin berKB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100$						
2.	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100$						

a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET RENSTR A 2023
1.	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	12,76	10,20	8,12	7,75	8,56	11,71	9
2.	Meningkatnya pemahaman Pasangan Usia Subur tentang ber KB	78,76	80,81	83,60	83,75	83,28	74,68	77,76

Rata-rata capaian kinerja bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk tahun 2022 target Unmet Need pada dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah laut sebesar 9% terealisasi 11,71% capaian kinerja

76,86%. Pemahaman PUS tentang ber KB dari target 90% terealisasi sebesar 74,68% dengan capaian kinerja 82,98%

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan realisasi tahun 2022 dari indikator Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) tercapai 11,71% dibanding tahun 2021 lebih tinggi, semakin rendah capaian unmet need semakin baik.

Perbandingan realisasi tahun 2022 dari indikator meningkatnya pemahaman pasangan usia subur tentang ber KB tercapai 74,68 dibandingkan dengan tahun 2021 capainya lebih rendah.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) pada bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 tercapai 11,71% dari target 9 %, semakin rendah capaian unmet need semakin baik karena bisa menekan angka kelahiran dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB tercapai 74,68% dari target 90% sehingga capaian kinerja sebesar 82,98%, ini hampir mendekati target, ini menunjukkan kenaikan karena animo PUS yang ber-KB cukup sadar dan paham tentang program ikut KB.

Salah satu indikator dalam pencapaian program keluarga berencana adalah terpenuhinya kebutuhan akseptor alat kontrasepsi. Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan reproduksi seorang wanita dengan perilaku yang berhubungan dengan kontrasepsi wanita tersebut. Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) diartikan sebagai besarnya proporsi wanita yang ingin berhenti dan menunda kelahiran akan tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Semakin rendah nilai Unmet Need maka semakin baik dalam mendukung peningkatan jumlah Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB

Idealnya Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB dan angka kelahiran total (TFR) memiliki hubungan terbalik, artinya semakin tinggi

pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif maka angka kelahiran total (TFR) akan semakin rendah

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	431.050.571,-	215.142.127,-	50
			2. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.750.000,-	58.865.000,-	99
			3. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.889.770,-	9.880.000,-	100
			4. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	41.107.782,-	33.751.096,-	82
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	115.901.357,-	107.544.301,-	93
			2. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)	159.998.550,-	144.477.048,-	90

			Keluarga/UPPKS)			
			3. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	102.387.201,-	81.210.950,-	79
			4. Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.728.220.000,-	588.347.502,-	34
			5. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	374.999.992,-	373.395.000,-	100
			JUMLAH	3.023.305.223	1.612.613.024	53,34

e. Analisis Realisasi Anggaran Program

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang KB dan KS hampir terlaksana secara keseluruhan yaitu dari pagu **Rp. 3.023.305.223,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.612.613.024,-** dengan prosentase capaian **53,347%**. Beberapa sub kegiatan mempunyai realisasi di bawah 50% yaitu :

- Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang realisasi 50% di sebabkan karena : beberapa calon akseptor tidak bisa mendapatkan pelayanan KB akibat memiliki penyakit darah tinggi/diabetes, beberapa mitra kerja (puskesmas) lebih memilih klaim pelayanan KB ke BPJS Kesehatan, serta Masih rendahnya minat akseptor untuk menggunakan Metode kontrasepsi MOW/MOP dan IUD.
- Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) hanya terrealisasi 34% karena : Rendahnya capaian Pelaksanaan pendampingan calon pengantin di desa target 5.092 kali terrealisasi sebanyak 314 kali hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat/Catin tentang Program Pemerintah mengenai aplikasi Elsimil dan pendampingan sehingga masih ada catin yang tidak bisa terdeteksi.

5. Esselon III (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Kinerja (%)	Catatan
1.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase penanganan Pengaduan	%	100	100	Kasus terselesaikan 49 kasus

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, pemerintah berupaya menghapus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Definisi kekerasan yang lebih luas dan sering menjadi rujukan adalah Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan

terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”. Definisi tersebut mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik. Secara umum, definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB mencakup antara lain: (i) kekerasan yang terjadi dalam keluarga, (ii) kekerasan yang terjadi di masyarakat umum, dan (iii) kekerasan yang dilakukan oleh Negara.

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh.

Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak. UNICEF mendefinisikan ‘perlindungan anak’ sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak. Dalam konteks tersebut jelas bahwa kekerasan anak tercermin dalam berbagai aspek terkait perlindungan anak sesuai dengan definisi dari UNICEF.

Dalam melaksanakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan

instansi terkait melakukan pelayanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi : pelayanan informasi dan koordinasi dengan instansi terkait, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, pelayanan medis dengan rujukan secara gratis. Tujuannya yaitu melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan 2022

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET RENSTR A 2023
4.	Persentase Penanganan pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak	100 (83 kasus)	100 (34 kasus)	100 (31 kasus)	100 (26 kasus)	100 (49 kasus)	100

Rata-rata capaian kinerja bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tahun 2022 dari pengaduan kekerasan 49 kasus bisa terselesaikan 100%

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan pengaduan kasus kekerasan tahun 2022 (49) kasus dengan tahun 2021 (26) kasus terjadi peningkatan jumlah kasus dan bisa terselesaikan 100%. Kasus kekerasan pada anak lebih banyak dibandingkan kasus kekerasan pada perempuan yang di layani DP2KBP3A Tahun 2022

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Kasus kekerasan yang dilaporkan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak pada tahun 2022 sebanyak 49 Kasus yang terdiri dari 13 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 36 kasus kekerasan terhadap anak. Pengaduan

kekerasan Tahun 2022 meningkat sebanyak 88,46 persen di tahun 2021 (26 kasus kekerasan dilaporkan pada tahun 2021).

Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, menjadi indikasi kegagalan atas upaya pencegahan yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah kasus di tengah masyarakat. Yang kedua, menjadi indikasi keberhasilan yang ditandai dengan keberanian dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasusnya sebagai implikasi atas upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan selama ini, serta implikasi atas tersedianya lembaga layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua sisi ini harus tetap disikapi dengan arif, melalui upaya edukasi dan penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak-hak perlindungan korban, pelembagaan perlindungan perempuan dan anak terpadu, penguatan kapasitas sumberdaya petugas layanan yang terintegrasi, serta penguatan kelembagaan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Dins P2KBP3A diantaranya

1. Layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Pertemuan koordinasi dan Kerjasama lintas sector dalam pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak.
3. Pelatihan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak
4. Pertemuan Jambore Forum Anak Daerah

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937	134.845.030	86

2	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.792	21.450.000	47
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.768.111	23.261.525	24
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.276.358	260.000	1	
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	112.274.769	51.532.000	45,90	
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.170.679	107.580.816	62,85
4	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	64.982.422,-	45.574.000,-	70

		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.356.724	113.813.500	50
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	165.117.593	47.175.588	29
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556	26.074.531	68
JUMLAH				1.118.190.941	571.566.990	51,12

e. Analisis Realisasi Anggaran Program

Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hampir terlaksana secara keseluruhan dengan jumlah pagu sebesar Rp.1.118.190.941,- terealisasi sebesar Rp. 571.566.990,- dengan prosentase capaian 51,12%. Beberapa sub kegiatan mempunyai realisasi di bawah 50% yaitu :

- Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota realisasi 47%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota hanya terealisasi 24%.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota hanya terealisasi 1%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota hanya terealisasi 45,90%.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi 29%
3. Pada program perlindungan khusus anak Alokasi dana untuk biaya pelayanan diberikan sesuai dengan pengaduan yang ada dan diberikan sesuai dengan kebutuhan.

6. Esselon III (Sekretaris) A

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD (Esselon III) Nomor : 9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Catatan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1.Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	%	100	100	100	
		2.Persentase perencanaan dan keuangan SKPD	%	100	100	100	
		3.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Skor	75(BB)	74(BB)	98,67	
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor	70(BB)	87,63(A)	125,19	

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Setiap instansi pemerintah wajib untuk Menyusun laporan kinerja di tiap tahunnya sebagai wujud penguatan akuntabilitas kinerja dan merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang masing-masing komponen. Nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

Tabel Pengkategorian Hasil Evaluasi SAKIP
(Sesuai Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021)

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 - 80	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 - 60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar.
7	D	0 - 30	Perlu banyak perbaikan, sebagai perubahan yang mendasar

Laporan Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 sd 100, DP2KBP3A memperoleh nilai sebesar 74,00 BB (sangat baik) terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik

ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja.

Nilai tersebut merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Diperoleh nilai sebesar 23,01 dari bobot sebesar 30% dengan kategori BB (sangat baik)

b. Pengukuran Kinerja

Diperoleh nilai sebesar 23,01 dari bobot sebesar 30% dengan kategori BB (sangat baik)

c. Pelaporan Kinerja

Diperoleh nilai sebesar 10,50 dari bobot sebesar 15% dengan kategori B (baik)

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Diperoleh nilai sebesar 17,50 dari bobot sebesar 25% dengan kategori B (baik)

2) Meningkatnya Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam rangka menjawab tuntutan era reformasi, dimana masyarakat Indonesia menghendaki adanya perubahan secara total di segala bidang penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di fokuskan pada data yang teruang pada dokumen formal serta dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian dan

penyimpulan hasil penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan :

- a. Dengan membuat simpulan dari hasil penilaian data objektif yang disampaikan oleh SKPD terkait sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi dengan kesesuaian tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria.
- b. Setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
A	Pemenuhan Dokumen	2,00	a. Manajem Perubahan
		1,00	b. Deregulasi Kebijakan
		2,00	c. Penataan Organisasi
		1,00	d. Penataan Tata Laksana
		1,40	e. Penataan Manajen SDM
		2,50	f. Penguatan Akuntabilitas
		2,20	g. Penguatan Pegawasan
		2,50	h. Peningkatan Pelayanan Publik
	Jumlah	14,60	
B	Reform	3,00	a. Manajem Perubahan
		2,00	b. Deregulasi Kebijakan
		1,50	c. Penataan Organisasi
		3,75	d. Penataan Tata Laksana
		2,00	e. Penataan Manajen SDM
		3,75	f. Penguatan Akuntabilitas
		1,95	g. Penguatan Pegawasan
		3,75	h. Peningkatan Pelayanan Publik
	Jumlah	21,70	
	Komponen Pengungkit	36,30	

- c. Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit dibagi dalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan di jawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak.
- d. Setiap jawaban “ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “tidak” maka akan diberikan nilai 0.

- e. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, asesor harus menggunakan professional *judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memengaruhi pada setiap kriteria.
- f. Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.

Setelah setiap pernyataan diberikan nilai maka penyimpulan atas hasil PMPRB dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen digunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Istimewa
2	A	>80 - 90	Sangat Baik
3	BB	>70 - 80	Baik
4	B	>60 - 70	Cukup Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Buruk
7	D	0 - 30	Sangat Buruk

Hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 yang dilakukan melalui proses reviu dokumen penilaian dalam LKE yang terintegrasi dengan Aplikasi SikReBo sampai tanggal 08 juni 2022 adalah sebesar 31,81 (87,63%).

Hasil penilaian mandiri pada tahun 2022 untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 disajikan dalam table berikut ini:

No.	Komponen/Sub Komponen	Hasil Penilaian	
		3	4
1	2	3	4
A	Pemenuhan	Nilai	%
1	Manajemen Perubahan	2,00	100,00
2	Deregulasi Kebijakan	0,75	75,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	100,00
4	Penataan Tatalaksana	0,84	84,00
5	Penataan Manajemen SDM	1,37	97,86
6	Penguatan Akuntabilitas	2,00	80,00
7	Penguatan Pengawasan	1,53	69,55
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,92	76,80
	Jumlah	12,41	85,00
B	Reform		
1	Manajemen Perubahan	3,00	100,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	100,00
4	Penataan Tatalaksana	3,11	82,93
5	Penataan Manajemen SDM	1,00	50,00
6	Penguatan Akuntabilitas	3,09	82,40
7	Penguatan Pengawasan	1,95	100,00
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	100,00
	Jumlah	19,40	89,40
	Total Jumlah Komponen Pengungkit	31,81	87,63

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

Rata-rata capaian kinerja bidang Sekretariat tahun 2022 terealisasi 100% antara lain:

1. Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian dari target 100 tercapai 100 %
2. Persentase perencanaan dan keuangan SKPD dari target 100 tercapai 100%
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD target skor 75 (BB) realisasi 74 (BB) dengan capaian kinerja 98,67%.
4. Nilai Reformasi Birokrasi SKPD target skor 70 (BB) realisasi 87,63 (A) telah melebihi target yang hendak di capai 125,19%

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

1. Nilai Indikator Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Dinas Perlindungan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bila di bandingkan dengan nilai kabupaten maka nilai SKPD P2KBP3A lebih tinggi daripada nilai Kabupaten.
2. Nilai Reformasi Birokrasi SKPD Dinas Perlindungan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bila di bandingkan dengan nilai kabupaten maka nilai SKPD P2KBP3A lebih tinggi daripada nilai Kabupaten

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja DP2KBP3A dengan Kabupaten Tanah Laut

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET DP2KBP3A	NILAI DP2KBP3A	NILAI KABUPATEN
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Skor	75 (BB)	74,00 (BB)	67,28 (B)
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Skor	70 (B)	87,63 (A)	60,19 (B)

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

- 1) Perbandingan Persentase tata kelola administrasi perkantoran sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 bisa dilaksanakan 100%.
- 2) Perbandingan Persentase perencanaan dan keuangan SKPD sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 tercapai 100%
- 3) Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- 4) Perbandingan nilai RB SKPD sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TARGET RENSTRA 2023
1	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100	100	100	100	100	100
2	Persentase perencanaan dan keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	68,60 (B)	70,40 (BB)	70,47 (BB)	71,58 (BB)	74,00 (BB)	75 (BB)
4	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	61,02 (B)	87,63 (BB)	75 (BB)

Beberapa kegiatan dalam rangka mencapai Kinerja dan PMPRB Dinas Perlindungan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Rapat Koordinasi dengan instansi lain
2. Melaksanakan kegiatan monitoring aksi secara berkala mulai dari unit eselon 2 sampai keunit dibawahnya
3. Melakukan evaluasi mandiri atas capaian target kinerja secara berjenjang dan berkala
4. Menjadikan hasil evaluasi sebelumnya agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Beberapa foto kegiatan :





d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

N O	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.128.832.656	4.456.804.024	86,90
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.173.848,-	7.467.000,-	81
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.468.932,-	74.200.000,-	87,84
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.535.311,-	12.034.140,-	55,88
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-	2.640.000,-	75,86
			Penyediaan Bahan/Material	12.994.708,-	12.179.741,-	94
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.624.075,-	186.958.689,-	97
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0
		Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Mebel	16.703.114,-	13.479.000,-	81

P e l i k s a n a n p r o g r a m 2 d a n		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.320.063,-	102.504.684,-	93,77
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.292.518,-	57.142.391,-	93
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.044.455,-	441.868.806,-	98
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,-	24.188.703,-	80,63
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,-	82.497.077,-	72
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.412.800,-	12.990.000,-	75
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	892.301.016,-
JUMLAH				7.146.183.496	6.257.716.255	87,57

kegiatan Bidang Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan pada 2 (dua) Program, 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan dana sebesar Rp. 7.146.183.496,- terealisasi sebesar Rp. 6.257.716.255,- dengan prosentase capaian 87,57%.

3.1 Esselon IV (Kasubbag. Umum dan Kepegawaian)

Tabel dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Melakukan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	400 Kegiatan	400 Kegiatan	100%
2	Melakukan pemenuhan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang terpenuhi sesuai aturan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100%
3	Melakukan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan di manfaatkan	12 kali	12 kali	100%
4	Menyusun Dokumen Reformas Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	1	1	100%
RATA – RATA CAPAIAN					100

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

Rata-rata capaian Kinerja Sekretariat telah terealisasi 100% dari 4 indikator kinerja,

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Keterbatasan tenaga administrasi perkantoran yang profesional penyusunan laporan.

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun 2022 yang terdiri dari indikator Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP, Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan, Jumlah sarana prasarana kantor yang terpelihara dan dimanfaatkan, Jumlah dokumen dan laporan yang disusun tepat waktu, Jumlah dokumen laporan kinerja semuanya terealisasi 100%.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

- Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 telah tercapai 100% dari target yang ada. Prosentase capaian dihitung Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai SOP dibagi Total layanan administrasi perkantoran sesuai SOP di kali 100%. Salah satu layanan yang dilaksanakan yaitu terlayani dengan baik atau sesuai SOP setiap pegawai yang akan naik pangkat.
- Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi sesuai aturan yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 telah tercapai 100% dari target yang ada
- Jumlah sarana prasarana kantor terpelihara dan dimanfaatkan telah tercapai 100% yaitu berupa pemeliharaan komputer, printer, AC sehingga memberikan kenyamanan kepada pegawai untuk melaksanakan kegiatan.

d. Faktor pendukung/Rencana aksi dalam mencapai sasaran yaitu

- Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pada pelayanan yang ada
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai
- Adanya dukungan dari masyarakat penerima pelayanan untuk mengikuti prosedur pelayanan sesuai yang dipersyaratkan

e. Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu

- Keterbatasan petugas yang memberikan pelayanan
- Keinginan dan harapan dari masyarakat agar pelayanan dapat diterima dengan cepat sementara pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku

f. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu

- Memaksimalkan pelayanan dengan memanfaatkan dukungan tenaga /staf setempat.
- Memberikan penjelasan secara baik kepada masyarakat tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan.

- Memasang keterangan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di ruang pelayanan.

3.2 Esselon IV (Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan)

Tabel dibawah ini memperlihatkan target realisasi indikator kinerja Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2	Menyusun laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
RATA – RATA CAPAIAN					100

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

Rata-rata capaian Kinerja perencanaan dan keuangan terealisasi 100% dari 2 indikator kinerja,

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Keterbatasan tenaga Perencanaan yang profesional penyusunan laporan perencanaan dan keuangan;
- Masih rendahnya kualitas penyusunan laporan perencanaan dan keuangan
- Minimnya data-data yang terkait dengan informasi kinerja, sehingga tidak memberikan informasi yang cukup bagi penyusun untuk melakukan analisis atas capaian kinerja.
- Data-data yang tersedia umumnya hanya data penyerapan anggaran serta realisasi fisik pekerjaan yang bersifat keluaran (out-put).

Faktor pendukung/Rencana aksi dalam mencapai sasaran yaitu:

- Dukungan tenaga Perencanaan yang profesional penyusunan laporan perencanaan dan keuangan.

- Memilih tim yang bertugas menyusun laporan perencanaan dan keuangan;
- Melakukan metode pengumpulan data dengan prosedur yang standar (Interview/dialog, Dokumentasi/dengan cara mengumpulkan dan mempelajari catatan-catatan yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan dan laporan).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Rekrutmen tenaga Perencanaan yang profesional;
- Evaluasi terhadap penyusunan laporan perencanaan dan keuangan secara berkala;
- Pemeriksaan dan pengawasan terhadap data-data yang terkait dengan informasi kinerja yang valid.

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :

Perbandingan target tahun 2021 dengan tahun 2022 yang terdiri dari indikator Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu, Jumlah dokumen laporan kinerja semuanya terealisasi 100%.

c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja :

- Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu. Terealisasi sebanyak 6 dukomen dengan target 6 dukomen, telah terealisasi 100%, Dokumen tersebut yaitu Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD), Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022, Dokumen Rencana Kerja Tahunan, (Renja/RKT) Tahun 2022, Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai dasar pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Tersedianya dokumen perencanaan dinas P2KBP3A sebagai bagian administrasi yang penting dalam pelaksanaan kegiatan
- Jumlah dokumen laporan kinerja Terealisasi sebanyak 5 dukomen dengan target 5 dukomen, telah terealisasi 100%, Dokumen tersebut yaitu Dokumen Catatan Laporan Atas Keuangan (CALK) Tahun 2020, Dokumen Laporan Kinerja yang di buat setiap Triwulan I, II,III dan IV hasil rekap capaian kinerja SKPD pada tahun berkenaan.

d. Faktor pendukung/Rencana aksi dalam mencapai sasaran yaitu

- Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pada pelayanan yang ada
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai
- Adanya dukungan dari masyarakat penerima pelayanan untuk mengikuti prosedur pelayanan sesuai yang dipersyaratkan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022 mendapatkan Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.792.856.788,- yang bersumber dari :

1. Dana APBD Kabupaten Tanah Laut Rp. 268.335.448.124,-
2. Dana DAK Fisik Reguler/Fisik Penugasan Penurunan Stunting bid. Kesehatan dan KB Subbid KB sebesar Rp. 1.267.805.800,-
3. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp. 3.776.862.081,- dan
4. Dana Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak (BOPPA.) Rp. 447.887.012,-

Dari dana yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 11.663.779.056,- dengan capaian realisasi keuangan 78,85%.

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	6.253.882.480,-	5.486.954.255,-	87,74
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.128.832.656,-	4.456.804.024,-	86,90
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.128.832.656,-	4.456.804.024,-	86,90
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.276.874,-	295.479.570,-	91,12

	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.173.848,-	7.467.000,-	81
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.468.932,-	74.200.000,-	87,84
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.535.311,-	12.034.140,-	55,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-	2.640.000,-	75,86
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	12.994.708,-	12.179.741,-	94
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.624.075,-	186.958.689,-	97
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.336.973,-	499.011.197,-	97,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.292.518,-	57.142.391,-	93
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.044.455,-	441.868.806,-	98
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.412.800,-	119.675.780,-	73,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,-	24.188.703,-	80,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,-	82.497.077,-	72
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.412.800,-	12.990.000,-	75
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.023.177,-	115.983.684,-	92,03
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	16.703.114,-	13.479.000,-	81
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	109.320.063,-	102.504.684,-	93,77

	Bangunan Lainnya			
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	215.934.411,-	176.116.434,-	81,56
1	Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	24.751.590,-	13.158.730,-	53
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.751.590,-	13.158.730,-	53
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	191.182.590,-	162.957.704,-	85,24
	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	21.027.339,-	13.300.203,-	63,25
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	24.547.373,-	19.786.391,-	80,60
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	7.964.204,-	7.963.407,-	100
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	137.643.905,-	121.907.703,-	89
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.723.341.676,-	4.134.166.576,-	87,52
1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	826.268.532,-	690.817.212,-	83,61
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.374.800,-	4.266.800,-	98
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.980.236,-	24.100.424,-	96
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	145.318.968,-	97.937.265,-	67
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme	166.100.000,-	129.345.000,-	78

	Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	445.494.528,-	414.367.723	93
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,-	20.800.000,-	52
2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.084.574.005,-	2.067.064.141,-	99
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.084.574.005,-	2.067.064.141,-	99
3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.434.099.139,-	1.088.400.223,-	75,89
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	431.050.571,-	215.142.127,-	50
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.750.000,-	58.865.000,-	99
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.889.770,-	9.880.000,-	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	892.301.016,-	770.762.000,-	86
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	41.107.782,-	33.751.096,-	82
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	378.400.000,-	287.885.000,-	76
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan	378.400.000,-	287.885.000,-	76

	Program KKBPK di Kampung KB			
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	2.481.507.100,-	1.294.974.801,-	52,19
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.481.507.100,-	1.294.974.801,-	52,19
	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	115.901.357,-	107.544.301,-	93
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	159.998.550,-	144.477.048,-	90
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	102.387.201,-	81.210.950,-	79
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.728.220.000,-	588.347.502,-	34
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	374.999.992,-	373.395.000,-	100
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	497.807.295,-	232.637.619,-	46,73
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.982.422,-	45.574.000,-	70
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	64.982.422,-	45.574.000,-	70
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat	394.474.317,-	160.989.088,-	40,81

	Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.356.724,-	113.813.500,-	50
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	165.117.593,-	47.175.588,-	29
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,-	26.074.531,-	68
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,-	26.074.531,-	68
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	171.170.679,-	107.580.816,-	62,85
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	171.170.679,-	107.580.816,-	62,85
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.170.679,-	107.580.816,-	62,85
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	291.711.210,-	96.503.525,-	33,08
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.792,-	21.450.000,-	47
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.792,-	21.450.000,-	47
2	Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	95.768.111,-	23.261.525,-	24

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	95.768.111,-	23.261.525,-	24
3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.551.127,-	51.792.000,-	34,40
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.276.358,-	260.000,-	1
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	112.274.769,-	51.532.000,-	45,90
VIII	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	157.501.937,-	134.845.030,-	86
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,-	134.845.030,-	86
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,-	134.845.030,-	86
TOTAL		14.792.856.788,-	11.663.779.056,-	78,85

2. Anggaran dan realisasi Menurut Sasaran dan Program

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Sasaran Program
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	6.253.882.480,-	5.486.954.255,-	Nilai Sakip (skor) BB (71,58)
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.128.832.656,-	4.456.804.024,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.128.832.656,-	4.456.804.024,-	
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.276.874,-	295.479.570,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.173.848,-	7.467.000,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.468.932,-	74.200.000,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.535.311,-	12.034.140,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-	2.640.000,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	12.994.708,-	12.179.741,-	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.624.075,-	186.958.689,-	
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.336.973,-	499.011.197,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.292.518,-	57.142.391,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.044.455,-	441.868.806,-	
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.412.800,-	119.675.780,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	30.000.000,-	24.188.703,-	

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,-	82.497.077,-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.412.800,-	12.990.000,-	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.023.177,-	115.983.684,-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	16.703.114,-	13.479.000,-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.320.063,-	102.504.684,-	
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	215.934.411,-	176.116.434,-	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,9%
1	Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	24.751.590,-	13.158.730,-	
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.751.590,-	13.158.730,-	
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	191.182.590,-	162.957.704,-	
	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	21.027.339,-	13.300.203,-	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	24.547.373,-	19.786.391,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	7.964.204,-	7.963.407,-	

	Sub Kegiatan Pengolahan & Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	137.643.905,-	121.907.703,-	
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	4.723.341.676,-	4.134.166.576,-	Total Fertility Rate (TFR) 2,32
1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	826.268.532,-	690.817.212,-	
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.374.800,-	4.266.800,-	
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.980.236,-	24.100.424,-	
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	145.318.968,-	97.937.265,-	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	166.100.000,-	129.345.000,-	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	445.494.528,-	414.367.723	
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,-	20.800.000,-	
	2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.084.574.005,-	2.067.064.141,-
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		2.084.574.005,-	2.067.064.141,-	
3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.439.782.286,-	820.107.576,-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	431.050.571,-	215.142.127,-	
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk	59.750.000,-	58.865.000,-	

	Jaringan dan Jejaringnya			
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.889.770,-	9.880.000,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	892.301.016,-	770.762.000,-	
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	41.107.782,-	33.751.096,-	
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	378.400.000,-	287.885.000,-	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	378.400.000,-	287.885.000,-	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	2.481.507.100,-	1.294.974.801,-	Total Fertility Rate (TFR) 2,32
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.481.507.100,-	1.294.974.801,-	
1	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	115.901.357,-	107.544.301,-	
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	159.998.550,-	144.477.048,-	
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	102.387.201,-	81.210.950,-	

	Keluarga/UPPKS)			
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.728.220.000,-	588.347.502,-	
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	374.999.992,-	373.395.000,-	
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	497.807.295,-	232.637.619,-	KLA Skor Pratama (551)
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.982.422,-	45.574.000,-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	64.982.422,-	45.574.000,-	
2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	394.474.317,-	160.989.088,-	KLA Skor Pratama (551)
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.356.724,-	113.813.500,-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	165.117.593,-	47.175.588,-	
3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,-	26.074.531,-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,-	26.074.531,-	

VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	171.170.679,-	107.580.816,-	KLA Skor Pratama (551)
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	171.170.679,-	107.580.816,-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.170.679,-	107.580.816,-	
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	291.711.210,-	96.503.525,-	IDG 72,80
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.792,-	21.450.000,-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.792,-	21.450.000,-	
2	Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	95.768.111,-	23.261.525,-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	95.768.111,-	23.261.525,-	
3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.551.127,-	51.792.000,-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.276.358,-	260.000,-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	112.274.769,-	51.532.000,-	
VIII	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN	157.501.937,-	134.845.030,-	IDG 72,80

1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,-	134.845.030,-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,-	134.845.030,-	
TOTAL		14.792.856.788,-	11.663.779.056,-	

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	5.272.728.544,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	6.253.882.480,-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.584.771.614,-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.128.832.656,-
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.584.771.614,-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.128.832.656,-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.612.000,-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.276.874,-
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.840.200,-	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.173.848,-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.155.920,-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.468.932,-
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.502.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.535.311,-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-
-	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	12.994.708,-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.593.880	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.624.075,-
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530,-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.530,-	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	262.718.248,-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	512.336.973,-

Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.600,-	-	0
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.040.600,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.292.518,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.687.048,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.044.455,-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.010.552,-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.412.800,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.060.552,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.950.000,-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.412.800,-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.637.600,-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.023.177,-
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	22.429.440,-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	16.703.114,-
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.208.160,-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.320.063,-
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	226.784.206,-	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	215.934.411,-
Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah	68.437.420,-	Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah	24.751.590,-

Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program KKBPK	26.124.480,-	-	0
Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	42.312.940,-	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.751.590,-
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	158.346.786,-	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	191.182.590,-
Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	42.995.280,-	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	21.027.339,-
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	17.100.000,-	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	24.547.373,-
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	52.837.970,-	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	7.964.204,-
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	45.413.536,-	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	137.643.905,-
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	5.169.876.746	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	4.723.341.676,-
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.086.315.720,-	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	826.268.532,-
-	-	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.374.800,-
-	-	Sub Kegiatan Komunikasi,	24.980.236,-

		Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.093.970,-	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	145.318.968,-
Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	206.177.844,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	166.100.000,-
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	810.043.900,-	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	445.494.528,-
-	-	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,-
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.085.528.740,-	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.084.574.005,-
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.085.528.740,-	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.084.574.005,-
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.439.782.286,-	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.434.099.139,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	793.217.296,-	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	431.050.571,-
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.740.310,-	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.750.000,-
Sub Kegiatan Pengendalian	50.247.000,-	Sub Kegiatan Pengendalian	9.889.770,-

Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	568.577.680,-	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	892.301.016,-
-	-	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	41.107.782,-
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	558.250.000,-	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	378.400.000,-
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	558.250.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	378.400.000,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	999.038.735,-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	2.481.507.100,-
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	999.038.735,-	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.481.507.100,-
Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38.659.600,-	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	115.901.357,-
Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan	64.164.546,-	Sub Kegiatan	159.998.550,-

Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62.414.596,-	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	102.387.201,-
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	608.800.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.728.220.000,-
Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	224.999.993,-	Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	374.999.992,-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	260.512.210,-	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	497.807.295,-
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/Kota	146.837.210,-	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/Kota	64.982.422,-
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125.422.210,-	-	-

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	21.415.000,-	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	64.982.422,-
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.675.000,-	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	394.474.317,-
-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.356.724,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	113.675.000,-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	165.117.593,-
-	-	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,-
-	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,-
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	34.702.436,-	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	171.170.679,-
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	34.702.436,-	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	171.170.679,-

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.702.436,-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.170.679,-
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	221.636.800,-	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	291.711.210,-
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.769.800,-	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.792,-
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota	71.658.300,-	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	32.111.500,-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.792,-
Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	117.867.000,-	Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	95.768.111,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	117.867.000,-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	95.768.111,-
-	-	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	150.551.127,-

		Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
-		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.276.358,-
-		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	112.274.769,-
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN	578.089.417,-	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN	157.501.937,-
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417,-	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578.089.417,-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,-
	12.763.369.094,-		14.792.856.788,-

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan penyelenggaraan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

- SASARAN 1** : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan indikator adalah :
- Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) realisasi 1,42 dari target 1,58 dengan capaian kinerja 111,27%.
- SASARAN 2** : Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun dengan indikator adalah :
- Persentase Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,12 dari target 2,24 dengan capaian kinerja 105,66%
- SASARAN 3** : Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator adalah :
- Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi 72,86% dari target 68,42 dengan capaian kinerja 106,23%
- SASARAN 4** : Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut sebagai Kota Layak Anak dengan indikator adalah :
- Skor capaian Kota Layak Anak (KLA) realisasi skor 575,25 (Pratama) dari target 700 (Madya) dengan capaian kinerja 78,71%.
- SASARAN 5** : Meningkatnya penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan realisasi sebesar 100 dari target 100 % dengan capaian kinerja 100%.
- SASARAN 6** : Meningkatnya pemahaman remaja tentang ber KB dengan indikator prosentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB dengan target 90% terealisasi 74,68% dengan capaian kinerja 82,98%.

- SASARAN 7 : Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera(KS) dengan indikator Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need) realisasi sebesar 11,71% dari target 9,00 % dengan capaian kinerja 76,86 %.
- SASARAN 8 : Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan perempuan dan Anak indikator prosentase penanganan pengaduan perempuan anak korban tindak kekerasan teralisasi 100% . Tertindak lanjuti dari jumlah 49 kasus.
- SASARAN 9 : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD dengan indikator 1) persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian target 100% tercapai 100% dengan capaian kinerja 100%, 2) persentase perencanaan dan keuangan SKPD target 100% tercapai 100% dengan capaian kinerja 100%, 3) nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah SKPD target 75 (BB) tercapai 74 (BB), 4) Nilai reformasi birokrasi target 75 (BB) tercapai 87,63 (BB).

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai *good corporate governance* (tata kelola organisasi yang baik) dan berorientasi pada *outcome*
2. Melakukan perencanaan kinerja tahunan SKPD yang selaras dengan RPJMD dan IKU SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..
3. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;
4. Membuat terobosan/inovasi yang dapat mempercepat pencapaian kinerja Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak:
5. Evaluasi kinerja dilakukan setelah pencapaian target kinerja yang ditentukan dan hasil dijadikan umpan balik. Dari hasil evaluasi kinerja akan mendapatkan penilaian kinerja serta rekomendasi-rekomendasi supaya

menjadi bahan pertimbangan perbaikan kinerja. Dalam tahap evaluasi, melibatkan berbagai pihak agar penilaian dapat obyektif.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang dapat disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, Maret 2023

Kepala Dinas,



Ir. NOR HIDAYAT
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19630824 199403 1 007

LAMPIRAN PENGHARGAAN

1. PENGHARGAAN MANGGALA KARYA KENCANA (MKK) KEPADA KETUA TP- PKK KABUPATEN TANAH LAUT

Manggala Karya Kencana (MKK) merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk.

Pada tahun 2022, Ketua TP-PKK Kabupaten Tanah Laut Ny. Hj. Nurul Hikmah Sukamta meraih penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) yang diserahkan pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Medan Sumatera Utara

Penghargaan Manggala Karya Kencana diterima Ketua TP-PKK Kabupaten Tanah Laut Ny. Hj. Nurul Hikmah Sukamta karena telah mempunyai dedikasi, komitmen, dukungan dan dharma baktinya yang besar dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Tanah Laut.

Foto Penyerahan Penghargaan Manggala Karya Kencana





2. PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK 2022

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Perolehan ini merupakan hasil dari menguatnya peran seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak dan melindungi anak-anak di Kabupaten Tanah Laut

Pada 22 Juli 2022 Acara Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2022 yang digelar secara virtual diikuti oleh Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut beserta jajarannya. Tanah Laut mendapatkan penghargaan tingkat Pratama.

**FOTO PENERIMAAN PENGHARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022
OLEH KEMENTERIAN PPPA RI SECARA VIRTUAL**



3. PENGHARGAAN DARI WANITA TELADAN DI BIDANG PENDIDIKAN KEPADA SALAH SATU KADER PPKBD KABUPATEN TANAH LAUT DARI OASE-KIM

Penghargaan DARI Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) diberikan kepada perempuan berjasa dan berprestasi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup dan Pertanian Pada Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia . Tahun 2022 ada sebanyak 514 penerima penghargaan dari OASE-KIM yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu perempuan/kader dari Kabupaten Tanah Laut mendapat penghargaan sebagai Wanita teladan di Bidang Pendidikan.

Penghargaan diserahkan pada Peringatan Hari Kartini 21 April 2022.

FOTO PENERIMAAN PENGHARAAN WANITA TELADA DIBIDANG PENDIDIKAN DARI OASE-KIM





4. PENGHARGAAN KECAMATAN KELUARGA BERKUALITAS PERTAMA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut mendapat Penghargaan Kecamatan Berkualitas Pertama di Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan di berikan atas dasar seluruh Desa di Kecamatan bajuin menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sector terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat

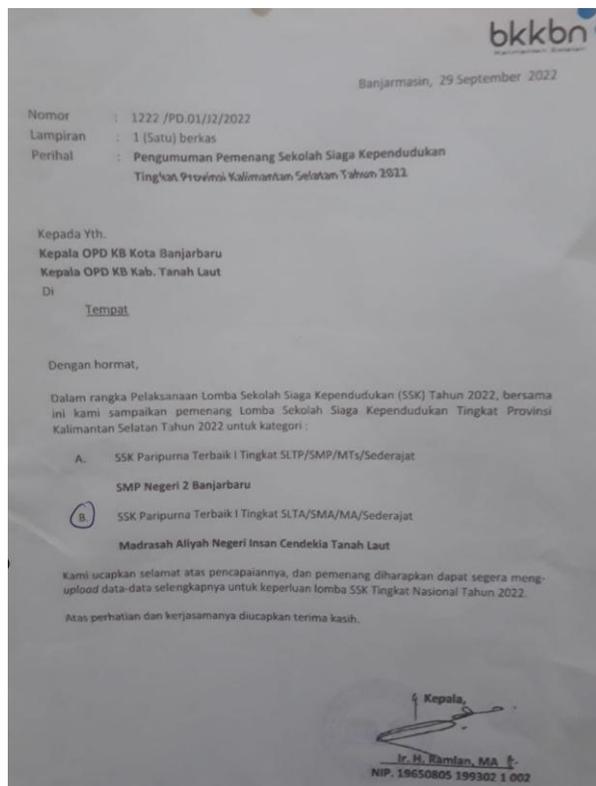
Penghargaan diserahkan oleh Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan kepada Kecamatan Bajuin



5. PENGHARGAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA MAN INSAN CENDIKIA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah Sekolah yang mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan kedalam beberapa mata pelajaran sebagai Pengayaan Materi Pembelajaran, dimana di dalamnya terdapat Pojok Kependudukan.

MAN Insan Cendikia berhasil mendapatkan piala dan penghargaan Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik I Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan



**6. PENGHARGAAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARGANAS
TAHUN 2022 BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

**a. PEMENANG LOMBA APREASIASI KELOMPOK BINA KELUARGA
REMAJA UNGULAN TINGKAT PROVINSI**

JUARA 2 BKR CERIA DESA BUMI JAYA KECAMATAN PELAIHARI



**b. LOMBA APRESIASI KELOMPOK PIK REMAJA UNGULAN (SMP)
TINGKAT PROVINSI**

JUARA 1 PIK REMAJA BERANI (SMPN 1 PELAIHARI)



**c. LOMBA APRESIASI KELOMPOK PIK REMAJA UNGULAN (SMA)
TINGKAT PROVINSI**

**JUARA 2 KELOMPOK PIK REMAJA CENDRAWASI (SMAN 1
PELAIHARI)**



7. PENGHARGAAN DALAM RANGKA OPD PENGELOLA DAK FISIK 2022 TERBAIK.

Pada Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut menerima piagam penghargaan OPD dengan Kinerja dan Realisasi Penyaluran DAK FISIK terbaik Tahun 2022 oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Tipe A2 Pelaihari pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022.

FOTO PENERIMAAN PIAGAM PENGHARGAAN TERBAIK KETIGA OPD DENGAN KINERJA DAN REALISASI PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2022



LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN : I (JANUARI - MARET) TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN (2019)	CAPAIAN TAHUN (2020)	CAPAIAN TAHUN (2021)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN (TW I)			TARGET AKHIR RENSTRA
							TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN	
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,21 (19=349.826 18=347.893)*100%	1,21 (348.623- 349.826*100%)	0,9	%	1,58	-	-	1,56
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,99 (2.227/167.5715x0,45)	2,81 (6.510/11.5450x5)	2,32	%	2,24	-	-	2,22
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,67	70,67	72,80	%	68,48	-	-	68,48
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	Skor	700 (Madya)	-	-	700 (Madya)

Pelaihari, April 2022
Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Tanah Laut



LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN : II (APRIL-JUNI) TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN (2019)	CAPAIAN TAHUN (2020)	CAPAIAN TAHUN (2021)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN (TW II)			TARGET AKHIR RENSTRA
							TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN	
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,21 (19=349.826 18=347.893)*100%	1,21 (348.623- 349.826*100%)	0,9	%	1,58	-	-	1,56
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,99 (2.227/167.5715x0,45)	2,81 (6.510/11.5450x5)	2,32	%	2,24	-	-	2,22
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,67	70,67	72,80	%	68,48	-	-	68,48
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	Skor	700 (Madya)	-	-	700 (Madya)

Pelaihari, Juli 2022
Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Tanah Laut



LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN : III (JULI - AGUSTUS) TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN (2019)	CAPAIAN TAHUN (2020)	CAPAIAN TAHUN (2021)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN (TW III)			TARGET AKHIR RENSTRA
							TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN	
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,21 (19=349.826 18=347.893)*100%	1,21	0,9	%	1,58	-	-	1,56
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,99 (2.227/167.5715x0,45)	2,81	2,32	Anak	2,24	-	-	2,22
3	Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,67	70,67	72,80	%	68,48	-	-	68,48
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	Skor	700 (Madya)	-	-	700 (Madya)

Pelaihari, Oktober 2022
 Kepala Dinas P2KBP3A
 Kabupaten Tanah Laut



LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN : IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN (2019)	CAPAIAN TAHUN (2020)	CAPAIAN TAHUN (2021)	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN (TW IV)			TARGET AKHIR RENSTRA
							TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN	
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,21 (19=349.826 18=347.893)*100%	1,21	0,9	%	1,58	1,42	111,27	1,56
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,99 (2.227/167.5715x0,45)	2,51	2,32	Anak	2,24	2,12	105,66	2,22
3	Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,67	70,67	72,8	%	68,48	72,86	106,23	68,48
4	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	551 (Pratama)	Skor	700 (Madya)	575,25	78,71	700 (Madya)

Pelaihari, Januari 2023
 Kepala Dinas P2KBP3A
 Kabupaten Tanah Laut

